

**HUBUNGAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN
POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
(2004 – 2008)**

***RELATIONSHIP NATIONAL RESILIENCE WITH
INDONESIA FOREIGN POLICY
(2004-2008)***

SKRIPSI



Disusun Oleh :

WIJAYATRI

98510375

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**HUBUNGAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN
POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
(2004 – 2008)**

Disusun oleh :

Nama Mahasiswa : WIJAYATRI
Nomor Mahasiswa : 98510375




Telah dipertahankan dalam ujian pendadaran, dinyatakan **LULUS** dan disahkan di
depan tim penguji Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu-Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juli 2011
Pukul : 09:30 WIB
Tempat : Ruang Uji HI-C, Fisipol UMY

TIM PENGUJI


Drs. Djumadi M. Anwar, M.Si.
Ketua


Drs. Sudivono, SU
Penguji I




Sugeng Riyanto, SIP.M.Si
Penguji II

HALAMAN MOTTO

"Dan apabila hamba-hamba-KU bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." (Al-Baqarah 2 : 186)

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman, berbuat baik dan saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran." (Q.s. Al-Asfir)

Rosullah SAW, bersabda: "Tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada ilmu, Karena ilmu mengantarkan pemiliknya kepada petunjuk dan mencegahnya dari kebinasaan. Seseorang tidak dapat lurus agamanya sebelum lurus akalnya." (Ath-Thabrani)

"Lupakanlah kegagalan kemarin, dan perasaan takut akan hari esok, pikirkan saja hari ini, Serta lakukanlah apa yang terbaik hari ini." (Papah-Indra)

"Tidak ada nilai dan harga hari behidupan tanpa belalahan nenacrhanaan dan

PERSEMBAHANKU

Terima kasihku yang akan aku persembahkan untuk.....

- # Allah SWT yang telah memberikanku kemudahan dan kelancaran dalam segala hal, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.
- # Kedua orang tuaku yang tercinta...Ba & mamah (M. Djafar Adam, SE & Sumiyati) yang sudah memberikan support baik itu secara materi maupun spiritual. Mungkin hal ini yang paling kalian tunggu, meskipun agak telat. Semoga ba dan mamah bisa senang dan bangga, amin.
- # My destiny.....Papah Indra, (D. Ardiansyah Setyawan, SH,MH)
- # Thank u so much ya pah, atas segala macam bentuk pengorbanan, kasih sayang, pengertian, kesabaran, kebaikan dan penderitaan serta airmata yang jatuh selama ini. Tetap semangat ya prince crab...(chikikie...soim deh, jd inget binti 99, cieee...cuit..cuit..) jangan pernah menyerah for us, apalagi bersedih, terus saja berdoa serta berusaha, karena Allah pasti akan menunjukkan mukjizat dan kuasanya tuk kita, forever! amien amien Ya Robball'amin....cepat sembuh ya sayang, banyak2 istirahat dan minum obat, ga usah mikir yang ga2, katanya mau barengan sampe kakek nenek? chikikie...luhpheee you so much, muach...
- # For my brother and my sister.....Indra Gunantara Resri Wijaya, STp, Nur Mukhlis Wijaya, SE, Ichsanty, SH (umet...chikikie..thanks for the lab and the sengnya selama ini yaw, harap maklum toe manga seng enu..hehhehehe, segera tentukan pilihan, ingat dah umur berapa neh...eksis teruusss, chikkie semangat!) S. Jaka Fairin dan Cintari Nurvasintha.

- ✚ Buat istri2nya abangku yang ada di Palembang dan Nd. Tia Airin Indriati,STp dan Riyani Handayani Rasyid,S,Psi
- ✚ Semoga selalu menjadi istri yang sholehah bagi suami dan contoh for kita dalam menata kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Amin.
- ✚ Buat bidadari kecil non yang cantik, pinter, ngaku imut di fb, (chikikie...maaf ya kak, tapi emang iyakan, ngaku deh..) ngeyel, sok teu dan yang selalu membanggakan hati ini....Fitzie Bella Nadezdha Celestin, yang rajin ya kak belajarnya, selalu doakan non, agar non bisa menjaga kakak dengan baik sampe kakak menjadi orang yang berguna, amin. Semoga kita bisa secepatnya bersama ya kak dalam suka dan duka, tapi tetep.....kalo nakal cubit ampe biru blau deh..luv u kak, muach.
- ✚ Buat ponakan2 non yang selalu non kangenin, Sifa Selikha Elsa Putri, Tiara Aurelia Denisa Putri, Satria Arya Wijaya alias Nine, alias baba, weh..weh..banyak kali namanya, chikikie.. dan tak lupa buat anakx mamah non yang cantik n tembem, (Unique.M.A.P) wherever you are..cepet gedhe ya biar papah bisa ketemu dan juga telpon2nan, terakhir buat adek..doakan mamah papah yang terbaik yah,muach...luv u all !
- ✚ Makasi juga buat bibi Lis, mama ni atas bantuan do'anya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan dan rejeki yang berlimpah, amien..
- ✚ Buat temen2 non yang dulu pernah bersama di kost Mutiara Angkasa.....
- ✚ Perpisahan memang menyedihkan coy, tapi itulah hidup..(cieeee..lebay mode on) Dokter anduk (kaweeeeen...eh nikah. buruaaan..) laras. muridku

pentol..sukses yah buat kalian semua...ingat kalo dah gajian traktir2 dunk,
masak dari jaman jebol ampe sekarang masih juga patungan chikikie....miss
u all !

- ✠ Special thanks buat adek mbak Wid yang baik hati, M. Aulia Rifky Limazi,
alias Kiky, alias jenk emoend..chikikie..
- ✠ Hai ses..semangat yah, maafin mbak karena dah terlalu sering ngerepotin
kamu, mbak cuma bisa bilang makasi yang sebesar2nya, dan ingat yah,
selamanya kita akan tetap jadi saudara, jagain mas, jangan sampe lecet
hehehehe, semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik buat kamu,
masa depan kamu tentunya, amin.
- ✠ for all my friend yang ga bisa gw sebutin satu persatu, temen2 satu kerjaan
and team, temen2 geol tempo dulu hahahahahaha, Ratih, Putri, Nita, thanks
guys....tetap semangat dalam menggapai masa depan, don't ever try to think
about man okey...chikikie....bye..bye..

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"HUBUNGAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004-2008"**. Guna memenuhi salah satu syarat menempuh ujian untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang penulis miliki. Maka dari itu penulis akan menerima saran dan kritikan dari pihak manapun yang sifatnya membangun. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan jerih payah penulis sendiri akan tetapi banyak pihak yang turut membantu memberikan saran-saran dan masukan-masukan baik itu berupa data maupun semangat yang memang penulis sangat butuhkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs Djumadi. M.Anwar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak waktu luang dan kebijakannya berkenaan

dalam memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

2. Bapak Drs Sudiyono, Su, selaku Dosen Penguji I
3. Bapak Sugeng Riyanto, S.IP,M.Si, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
4. Bapak Zumari, Mas Waluyo, Om Ayub, terimakasih atas bantuannya selama ini.
5. Segenap karyawan TU Fisipol dan Perpustakaan.

Akhir kata semoga amal baik Bapak/Ibu, saudara/i, dalam memberikan masukan dan saran, pertanyaan dan tanggapan serta dorongan semangat diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Skripsi ini tentu saja masih sangat mungkin mengandung kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak, sehingga dikemudian hari penulis bisa memberikan yang lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan dan harapan pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Perumusan Masalah.....	9
D. Kerangka Teori.....	9
E. Hipotesa.....	19
F. Tujuan Penelitian.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
H. Jangkauan Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN KEBIJAKAN	
PERTAHANAN INDONESIA PASCA REFORMASI.....	24
A. Dasar Serta Perumusan Kebijakan Luar Negeri Indonesia....	24

B. Dinamika Kebijakan Luar Negeri.....	27
1. Masa Orde Baru (Masa Kepemimpinan Soeharto).....	28
2. Masa Kepemimpinan BJ Habibie.....	33
3. Masa Kepemimpinan Abdurahman Wahid.....	36
4. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.....	38
5. Masa Kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono	40

BAB III KEBIJAKAN PERTAHANAN KEAMANAN BANGSA

INDONESIA PADA TAHUN 2004-2008.....	45
A. Langkah Pemerintah Indonesia Dalam Reformasi Pertahanan Keamanan	45
B. Penggunaan Langkah Pemberdayaan Masyarakat Sipil Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pertahanan	53
C. Penggunaan Langkah Diplomasi Dalam Pelaksanaan Pertahanan keamanan.....	58

BAB IV PENCAPAIAN TUJUAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

INDONESIA MENDUKUNG KETAHANAN

NASIONAL.....	64
A. Mewujudkan Peningkatan Dan Penguatan Hubungan Dan Kerja Sama Bilateral Dan Regional Di Berbagai Bidang Di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika.....	64
B. Efektifitas Dalam Meningkatkan Hubungan dan Kerja Sama	

Bilateral Dengan Negara-Negara Dan Organisasi Internasional Di Kawasan Amerika Dan Eropa	71
C. Pemenuhan dalam Upaya Mewujudkan Peran Dan Kepemimpinan Indonesia Dalam Kerja Sama ASEAN	74
D. Efektifitas Dalam Pemenuhan Upaya Memperkuat Citra Indonesia.....	76
E. Mengoptimalkan Diplomasi Melalui Pengelolaan Hukum Dan Perjanjian Internasional.....	80
BAB V KESIMPULAN	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hubungan Ketahanan Nasional Dengan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (2004 – 2008)

Wijayatri
98510375

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebijakan pertahanan keamanan dengan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2008. Khususnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masalah pertahanan keamanan tersebut menumpuk dan menjadi sebuah persoalan penting yang memaksa menjadi sebuah kepentingan nasional. Dimana pemerintah Indonesia mengalami krisis kepercayaan politik yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri.

Langkah Indonesia dalam meningkatkan pertahanan keamanan nasional dalam bidang politik dan sosial semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu langkah Pemerintah Indonesia dalam Reformasi Pertahanan Keamanan yaitu berupa (1) pembentukan Rangkaian Kebijakan Pertahanan Negara Sesuai Dengan Mandate Pasal 16 UU 3/2002, (2) Menyusun ulang anggaran pertahanan Indonesia (3) Penggunaan Langkah Pemberdayaan Masyarakat Sipil Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pertahanan dan Keamanan yaitu diantaranya diwujudkan melalui melibatkan peningkatan kemampuan, serta dalam bentuk pengawasan yang dilakukan (4) Penggunaan Langkah Diplomasi dalam pelaksanaan Pertahanan Keamanan. Dalam hal ini adalah memunculkan upaya untuk mengoptimalkan diplomasi sebagai garis depan pertahanan Politik Luar Negeri Republik Indonesia untuk menghilangkan intensi dan situasi yang akan memicu konflik.

Di akhir periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dilihat berbagai upaya tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Diantaranya pemenuhan terhadap tujuan politik luar negeri sesuai dengan tujuan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam hal ini akan diuraikan melalui langkah-langkah yang paling menonjol dilakukan oleh Indonesia, yaitu: *Pertama*, efektifitas dalam meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara dan organisasi internasional di kawasan Amerika dan Eropa; *Kedua*, pemenuhan dalam upaya mewujudkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN; *Ketiga*, efektifitas dalam pemenuhan upaya memperkuat citra Indonesia. *Keempat*, mengoptimalkan diplomasi melalui pengelolaan hukum dan perjanjian internasional.

Kata Kunci: Ketahanan Nasional. Politik Luar Negeri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam setiap karya tulis ilmiah terdapat suatu kriteria yang harus selalu diperhatikan, yakni kewajiban untuk membahas apakah masalahnya cukup penting dan menarik untuk diselidiki oleh karena itu maka pemilihan judul atau topik dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada pedoman bahwa topik masih berada dalam jangkauan kemampuan dan pengetahuan penulis, data yang diperlukan untuk membahas permasalahan cukup banyak tersedia serta topik yang dipilih cukup penting untuk diselidiki dan cukup menarik untuk dibahas.¹

Sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, didasari alasan bahwa permasalahan ketahanan nasional perlu diketahui secara lebih mendalam, mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang secara geografis menempati posisi silang, diapit antara dua benua dan dua samudera yaitu sebelah utara Benua Asia dan sebelah selatan Benua Australia serta di sebelah utara Benua Asia dan sebelah timur Samudera Pasifik.

Sebagai negara yang baru berkembang, Indonesia dihadapkan pada masalah modernisasi dalam rangka pengejaran ketinggalan dari segala

¹ Sutiana, Hadi. *Metodologi Penelitian, Penyusunan Paper, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jilid I

keterbelakangannya, suatu kenyataan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, dan kenyataannya ini merupakan kenyataan bagi bangsa Indonesia dan sekaligus menciptakan tantangan-tantangan. Sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan masyarakat nusantara menuju terwujudnya kesatuan bangsa tidak selalu berjalan mulus, melainkan terkadang berhadapan dengan berbagai masalah termasuk disintegrasi bangsa.

Periode tahun 2004-2008 merupakan masa penting bagi orientasi politik luar negeri Indonesia. Pada masa ini, kepemimpinan Indonesia telah mengalami masa stabil. Di masa kepemimpinan pasca reformasi, Indonesia mengalami masa pergantian kepemimpinan yang relative cepat. Hingga masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-lah secara legitimasi benar-benar secara penuh (masa kepemimpinan 5 tahun) terpenuhi. Di sisi lain pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengalami masa banyak permasalahan baik di bidang pertahanan maupun kemanan. Permasalahan tersebut muncul karena warisan di masa kepemimpinan sebelumnya maupun di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sendiri..²

Oleh karenanya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2008 memunculkan sebuah fenomena baru dimana permasalahan ketahanan yang dihadapi oleh Indonesia mengalami banyak tantangan. Akibatnya Indonesia di mata politik internasional mengalami penurunan citra. Hal ini pada akhirnya mulai menghambat berbagai penyelesaian permasalahan dengan berbagai negara. Hal inilah yang kemudian

² Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru,
<http://frenndw.wordpress.com/2010/01/13/politik-luar-negeri-indonesia-pasca-orde-baru/> diakses

memunculkan kesan bahwa kebijakan luar negeri Susilo Bambang Yudhoyono berkesan hanya untuk memulihkan citra baik Indonesia di luar negeri, dan kurang memperhatikan ke dalam negeri. Oleh karena itu, banyak pihak yang menganggap PLNRI Susilo Bambang Yudhoyono dengan sebutan: *"It's About Image"*.³

Dengan fenomena tersebut, penulis sangat ingin untuk melakukan penelitian dengan judul: **"HUBUNGAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2004 – 2008"**

B. Latar Belakang Masalah

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2008, bangsa Indonesia mengalami ujian yang bertubi-tubi khususnya pada masalah pertahanan keamanan. Meskipun permasalahan pertahanan keamanan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya diwarisi berbagai persoalan yang muncul sebelumnya namun dalam kurun pergantian kepemimpinan hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan Megawati muncul berbagai peristiwa yang mengancam keamanan pertahanan dan membuat insiden buruk di mata internasional. Diantaranya adalah (1) terorisme yaitu dengan peristiwa pemboman di kedutaan Besar Australia, Bom Bali I dan II, Atrium, dan hotel JW.Marriot (2) separatism, terjadinya tuntutan daerah aceh dan papua untuk

memisahkan diri dari NKRI (3) lepasnya territorial Indonesia yaitu lepasnya pulau Sipadan-Ligitan. Persoalan-persoalan ini belum dapat terselesaikan dengan baik dan kemudian memperburuk kondisi di masa kepemimpinan setelahnya (yaitu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono).

Akibatnya citra Indonesia di mata politik internasional mengalami penurunan. Berbagai negara melontarkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pertahanan di Indonesia. Dalam penanganan terorisme justru menghasilkan ketidakpastian dan keragu-raguan masyarakat internasional. Hal ini muncul karena berbagai pernyataan resmi pemerintah mengenai dukungan untuk menghentikan terorisme cenderung bertentangan dengan fakta di lapangan. Fakta di lapangan menunjukkan belum adanya kemajuan terhadap penanganan terorisme yang ditunjukkan dengan belum tertangkapnya gembong-gembong yang dianggap sebagai pelaku utama terorisme.

Buruknya citra Indonesia di mata internasional pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan kebijakan politik negeri. Berbagai kegagalan mengiringi langkah diplomasi Indonesia di berbagai negara. Salah satu contoh kegagalan tersebut adalah (1) Gagalnya pemerintah Indonesia membentuk kebijakan bilateral yang protektif antara Indonesia dengan negara tujuan buruh migran Indonesia. Kebijakan bilateral ini merupakan kebutuhan mendesak sebagai jaminan pemenuhan HAM buruh migran Indonesia di berbagai negara tujuan. Salah satu contohnya adalah gagasan dan upaya untuk membentuk kebijakan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Beberapa kali telah

digagas pertemuan bilateral antara Indonesia – Saudi Arabia, namun selalu menemui jalan buntu.⁴

(2) lemahnya posisi Indonesia dalam membahas berbagai bantuan asing. Termasuk diantaranya adalah perundingan yang dilakukan antara Indonesia dengan IMF dan CGL. Terkesan bahwa praktik diplomasi Indonesia dengan kedua lembaga itu nyaris tidak pernah menyentuh persoalan teknis-administratif ekonomi. Hasilnya pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dengan berbagai syarat yang sangat memberatkan dan cenderung tidak sesuai dengan kondisi Negara Indonesia sendiri.⁵

Melihat kondisi inilah yang memunculkan beberapa pertimbangan baru mengenai pentingnya pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperbaiki tingkat pertahanan Indonesia. Harapannya dengan upaya tersebut maka citra politik Indonesia di mata Internasional akan kembali mengalami perbaikan. Oleh karenanya pada masa inilah kemudian Susilo Bambang Yudhoyono melakukan beberapa langkah konkrit yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kemandirian pertahanan. Diantaranya adalah (1) Mengintensifkan reformasi di bidang pertahanan nasional dengan melengkapi perangkat perundang-undangan, yaitu antara lain pertahanan, lembaga kemiliteran Indonesia, lembaga kepolisian, aparat intelejen, dan inklusif mengenai alokasi dana keamanan nasional serta pengawasan penggunaannya,

⁴ Rapor Merah Pemerintahan SUSILO BAMBANG YUDHOYONO-JK, Dalam Agenda Perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia, di Luar, <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=678>, diakses pada tanggal 1 Juli 2010

⁵ Riza Noer Arfani, Diplomasi Paras Tinggi Untuk Indonesia, http://www.irevogva.org/ire.php?about=f22_gagas.htm diakses pada tanggal 1 Juli 2011

dan hal-hal yang berkaitan dengan bidang keamanan nasional. Salah satu bukti konkret dalam reformasi pertahanan nasional adalah dikeluarkannya Perpres No 7/2008. Cakupan bahasan dalam Perpres No 7 Tahun 2008 adalah Landasan Pertahanan Negara (Kepentingan Nasional, Keamanan Nasional, Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia), serta Kebijakan Pertahanan Negara (Doktrin dan Strategi Pertahanan, Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan, Kebijakan Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Pertahanan, Kebijakan Penganggaran, Kebijakan Kerjasama Internasional, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Kebijakan Pengembangan Postur Pertahanan, dan Kebijakan Pengawasan.⁶

(2) mengembangkan potensi kalangan sipil dalam bidang pengembangan bidang pertahanan negara. Diantaranya adalah dukungan yang diberikan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono terhadap munculnya banyak kelompok sipil yang tergabung dalam berbagai lembaga pengkajian (di Jakarta: CSIS, RIDeP, Lembaga Studi Keamanan, dan Masyarakat Indonesia untuk Studi Hubungan Internasional. Di Yogyakarta: PSKP dan lain-lain) yang memiliki komitmen atau perhatian dalam bidang pertahanan. Demikian juga banyak lembaga penelitian yang dikelola oleh kalangan sipil, di beberapa perguruan tinggi (ITB, ITS, UGM, PT Dirgantara Indonesia, dan lain-lain) yang mendukung penemuan-penemuan dan pengembangan bidang pertahanan negara. Lembaga-lembaga seperti RAND Corporation, Herigate Institute,

⁶ Mufti Makaarim, Critical Review Peraturan Presiden Nomor 7/2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Makalah Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) Jakarta.

Brookings Institute, dan juga *the Massachusetts Institute of Technology (MIT)*, *California Institute of Tecnology (Caltech)* dan sebagainya.

(3) mengalokasikan dana yang mencukupi untuk bidang keamanan pertahanan nasional, khususnya ketertiban umum, dengan meningkatkan monitoring implementasi yang efektif dan efesien. Dalam hal ini maka modernisasi peralatan organisasi, disamping peningkatan kesejahteraan personel TNI dan Polri menjadi prioritas utama. Masalah ini cukup crucial oleh karena disamping menentukan kemantapan dalam perencanaan pengembangan bidang pertahanan dan ketertiban umum juga akan menghilangkan “kesemerawutan” penggalian dan penggunaan dana di luar.

(4) langkah diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, diplomasi merupakan inti dari politik bebas aktif, yakni bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan arahan kepada para pelaksana diplomasi Indonesia *continuity and change* bagi kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Sekaligus menggaris bawahi betapa pentingnya aspek kepedulian, keberpihakan, dan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Satu-dua tahun terakhir, pelaksanaan kebijakan luar negeri memasuki tataran orientasi yang lebih membumi dengan meningkatnya sentuhan kepentingan publik.⁷

Hasil konkret dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah keberhasilan yang dilakukan dalam pelaksanaan politik internasional.

⁷ Ade Priangani, “Tantangan Politik Luar Negeri Masa Pemerintahan SUSILO BAMBANG YUDHOYONO-*husuf Kallā*” Jurnal Paradiema Polistaat. Vol. 5 No. 3. Desember 2004-Februari

Diantaranya adalah (1) Pada tataran ASEAN misalnya, Indonesia telah berhasil mengusulkan komunitas keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community (ASC), (2) Naiknya posisi politik Indonesia dalam Peringatan ke 50 Konferensi Asia Afrika ditahun 2005 sebagai sebuah upaya untuk mengingatkan kembali pentingnya persatuan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika, (3) Konferensi Internasional Perubahan Iklim di Bali pada Desember tahun 2007 yang disponsori oleh PBB, (4) masuknya usulan Susilo Bambang Yudhoyono dalam penanganan krisis global pada akhir tahun 2008 yang akhirnya membuat Indonesia diundang untuk memberikan pandangannya dalam pertemuan negara-negara industri maju G20 di London Inggris tahun 2009, dan (5) Indonesia mencoba untuk melakukan kampanye perlindungan laut dan karang (World Ocean Conference) di Manado.⁸

Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dapat mengembalikan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Salah satu kebijakan yang diambil berkaitan dengan hal diatas adalah dibukanya kembali kerjasama hubungan bidang pertahanan lewat IMET (International Military Education and Training) pada tahun 2005. Selain itu pada masa Susilo Bambang Yudhoyono ini juga semakin dimantapkan hubungan Indonesia-China dengan dideklarasikannya Deklarasi Kemitraan Strategis antara Indonesia dengan China.

Berdasarkan kajian di atas dapat dilihat bahwa munculnya hubungan antara masalah pertahanan dengan politik luar negeri Indonesia. Ketahanan

⁸ Tonny Dian Effendi, Agenda Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Pemilihan Presiden 2009, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/138/164> diakses tanggal 8 Februari 2011

nasional sangat menentukan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, kondisi dinamis dari perjalanan politik Indonesia memerlukan suatu tatanan politik dan pergaulan antara negara. Maka dari itu ketahanan nasional merupakan syarat yang pokok dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Bila pelaksanaan politik luar negeri Indonesia berjalan lancar maka ketahanan nasional akan terwujud dan stabilitas nasional akan terjamin sesuai dengan dasar-dasar dari Dasasila Bandung, yakni politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif diabdikan untuk kepentingan nasional.⁹

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik suatu pokok permasalahan yaitu:

“Bagaimana hubungan antara kebijakan pertahanan keamanan dengan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2008?”

D. Kerangka Teori

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan menggunakan teori sebagai berikut:

Konsep Pertahanan Keamanan

Konsep pertahanan dan keamanan bagi suatu negara mencerminkan kemampuan negara tersebut untuk melaksanakan berbagai kebijakan.

⁹ Djumadi M. Anwar. *Spektrum Diplomasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif*, Fisipol-UMY,

Dimana suatu negara yang dianggap dapat menjamin stabilitas pertahanan dianggap memiliki dukungan yang cukup pula untuk melaksanakan kebijakan luar negeri. Dengan kata lain pertahanan merupakan kunci kredibilitas oleh suatu negara. Hal ini ke depannya menentukan posisi politik suatu negara di mata internasional. Oleh karenanya konsep pertahanan keamanan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh suatu negara.

Demikian pula dalam kasus upaya yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam hubungan antara pertahanan dan politik luar negeri. Perubahan pertahanan yang dialami oleh Indonesia akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan luar negeri pemerintah. Ketika berbagai negara internasional memandang pemerintah Indonesia tidak bisa melindungi pertahanan keamanan maka turunlah pamor politik Indonesia. Demikian pula sebaliknya ketika pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki kondisi pertahanan di dalam negeri dan berujung pada kestabilan keamanan maka berbagai negara mengapresiasi dengan naiknya posisi politik Indonesia di luar negeri. Naiknya citra Indonesia otomatis akan mempengaruhi pula posisi tawar (*bargaining position*) dan kelancaran pelaksanaan politik luar negeri.

Departemen Pertahanan Indonesia memberikan definisi bahwa Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mencegah dan menangkis lawan, melindungi dan membela kepentingan nasional terhadap segala macam paksaan dengan kekerasan dan serangan dari pihak lain. Kekuatan,

kemampuan, daya tahan, dan keuletan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara".¹⁰ Sedangkan konsep keamanan seperti yang dikutip dari *Encyclopedia of the Social Sciences* didefinisikan sebagai berikut: "kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar"¹¹ .

Sedangkan bagaimana suatu negara dalam mengatasi berbagai permasalahan ketahanan keamanan maka disesuaikan dengan jenis atau tipe permasalahan itu sendiri. Terdapat empat tipe masalah pertahanan yang masing-masing menentukan langkah kebijakan berbeda dari pemerintah, yaitu: *Pertama*, "Kategori A" adalah ancaman terhadap kelangsungan hidup dan eksistensi serta keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Secara potensial ancaman ini bukan hanya datang dari luar negeri tetapi juga bisa datang dari dalam negeri Indonesia. Dapat berupa invasi militer negara lain, dan juga dapat berupa penguasaan ekonomi-politik Indonesia oleh negara lain. Termasuk kategori A ini adalah pemberontakan dan kudeta di dalam negeri Indonesia. *Kedua*, ancaman "Kategori B", yaitu tindakan yang mengancam kepentingan nasional Indonesia, namun tidak langsung mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Termasuk di dalam kategori ini adalah infiltrasi atau provokasi dari luar negeri militer asing maupun non militer.

¹⁰ www.dephan.go.id diakses pada tanggal 1 Juli 2010

¹¹ Kusnanto Anggota dalam Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII

Ketiga, ancaman "Kategori C", adalah tindakan yang mengganggu ketertiban umum, namun tidak secara langsung mengancam kepentingan nasional maupun keutuhan bangsa dan negara. Kerusuhan sosial maupun politik, konflik horizontal (primordial), dan teror yang mungkin berupa peledakan atau pemboman tempat-tempat strategis, adalah beberapa diantara bentuk ancaman "kategori C".

Keempat, ancaman "Kategori D", adalah ancaman terhadap keamanan nasional berupa suatu situasi atau tindakan-sistemik yang secara konseptual maupun teoritis bukanlah ancaman langsung terhadap keamanan nasional maupun terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia, akan tetapi dalam jangka panjang melalui suatu proses atau melalui suatu mekanisme sosial-politik tertentu situasi atau tindakan tersebut akan menjadi ancaman konkrit terhadap keutuhan bangsa dan negara. Termasuk dalam kategori ini adalah sistem politik yang tidak stabil atau sistem politik yang tidak berhasil melembagakan diri, misalnya sistem politik yang secara kongkrit tidak bisa merespon aspirasi sosial dan politik, atau tindakan elite politik nasional maupun lokal, khususnya para pejabat pemerintahan (termasuk para pejabat aparat keamanan dari TNI dan Polri) yang tidak mampu menyerap/memenuhi kepen-tingan sosial, ekonomi, dan politik anggota masyarakat.

Bentuk pelaksanaan untuk meningkatkan kebijakan pertahanan sendiri berkembang seiring dengan perkembangan dari potensi ancaman terhadap pertahanan keamanan itu sendiri. Pertahanan Keamanan sering dikaitkan

dengan kemampuan negara untuk melindungi apa yang ditetapkan sebagai nilai-nilai inti (*core values*), yang pencapaiannya merupakan sebuah proses terus-menerus, dengan menggunakan segala elemen power dan resources yang ada serta melingkupi semua aspek kehidupan.

Oleh karenanya di masa era globalisasi saat ini pertahanan keamanan tidak hanya menyangkut mengenai militer. Bentuk-bentuk pertahanan negara dapat dijalankan melalui tiga bidang yaitu militer, ekonomi dan politik. Militer juga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur besar kekuatan negara. Persenjataan sangatlah dibutuhkan jika kekuatan negara telah jatuh atau upaya diplomatik mengalami kegagalan. Perlombaan senjata juga merupakan perkembangan kekuatan militer dapat ditinjau dalam dua hal yaitu dalam segi kuantitatif dan teknologi yang dimiliki negara tersebut.¹²

Kedua konsep diatas membantu peneliti untuk menguraikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menstabilkan kondisi pertahanan tidak hanya pada bidang militer saja namun juga pada bidang terkait yaitu ekonomi dan politik. Dalam penelitian ini akan dibatasi pada bidang politik dan militer. Keterkaitan bidang tersebut dapat dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak hanya menyangkut perkembangan militer namun juga reformasi pertahanan (termasuk undang-undang), memperdayakan

¹² Samuel P. Huntington, *Arms Races: Prerequisites and Results In Public Policy*. Harvard.

masyarakat sipil dalam pelaksanaan pertahanan keamanan serta langkah diplomasi.

Sedangkan bagaimana hubungan antara pertahanan keamanan terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri dapat didasarkan bahwa pada konsep pertahanan suatu negara merupakan faktor utama dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Suatu negara tidak akan bisa menjaga eksistensinya dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri apabila belum mampu untuk mempertahankan diri dari ancaman tersebut. Oleh karena eratnya kaitan pertahanan negara dengan harkat dan martabat suatu bangsa, maka dengan adanya pertahanan negara yang memadai (Postur Pertahanan yang Kuat) akan membuat bangsa lain tidak memandang sebelah mata terhadap bangsa kita.¹³

Dalam suatu sistem politik suatu kondisi tidak akan terlepas dari kondisi yang lain atau suatu bidang tidak akan terpisah dari perkembangan bidang yang lain. Demikian pula dalam kasus hubungan antara pertahanan keamanan terhadap politik luar negeri Indonesia maka antara kondisi suatu bidang tidak akan terpisah dari kondisi dalam bidang lainnya. Jika kita beranggapan bahwa sistem tingkah laku politik merupakan suatu unit tersendiri, maka akan terlihat yang menjamin terus bekerjanya sistem itu adalah berbagai macam input. Input-input ini diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem itu menjadi output dan selanjutnya output-output

¹³ [http://www.tandef.net/pertahanan-negara-merupakan-cermin-dari-martabat-bangsa-dan-negara,](http://www.tandef.net/pertahanan-negara-merupakan-cermin-dari-martabat-bangsa-dan-negara)

ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan dimana sistem itu berada.¹⁴

Kepentingan Nasional

Menurut Morgenthau, tujuan-tujuan umum suatu negara adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara-negara lain. Tujuan-tujuan umum tersebut, para pemimpin suatu negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik bersifat kerja sama maupun konflik.

Menurut Jack C Plano dan Roy Olton, Kepentingan Nasional adalah :

"The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of state in making foreign policy. The national interest of state is typically a highly generalized conception of those element that constitute the state smart vital needs".¹⁵

Kepentingan nasional merupakan konsep yang populer untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku internasional. Dengan demikian kepentingan nasional merupakan kunci untuk memahami perilaku politik luar negeri suatu negara, di mana negara-negara selalu bertindak untuk tujuan kepentingan nasional. Morgenthau mengatakan bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional dituntut oleh pengejaran kepentingan nasional, kepentingan nasional itu adalah memperoleh, mempertahankan atau memperbesar

¹⁴ Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hal.4

¹⁵ Jack C Plano and Roy Olton, *Internasional Relation Dictionary*, Holt and Winston, New York, 1969, hal 89

kekuatan negara.¹⁶ Kepentingan nasional (*national interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan negara-negara atau sehubungan dengan hal-hal yang dicita-citakan. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut antara lain kesejahteraan ekonomi.¹⁷

Dalam kerangka ini, maka mengutip pernyataan Hans J Morgenthau bahwa terdapat elemen mendasar yang menjadi pijakan bagi pembuat kebijakan luar negeri (*policy maker*) yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional suatu negara yaitu;

- a. Elemen logis yang dibutuhkan, dimana berkaitan dengan kelangsungan hidup negara
- b. Elemen perubah yang meliputi bentuk perubahan kondisi lingkungan dalam negeri.¹⁸

Konsep kepentingan nasional membantu peneliti untuk menjelaskan munculnya kepentingan Indonesia yang mempengaruhi proses kebijakan di dalam negeri. Perubahan kondisi pertahanan menjadi dua elemen (Elemen logis dan elemen perubah) yang ikut menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah-langkah dalam merubah kebijakan pertahanan. Dimana elemen logis adalah munculnya kepentingan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan

¹⁶ Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 146

¹⁷ Jack C. Plano & Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, terj. Wawan Juanda, Abardin CV, Bandung, 1990, hal 5.

¹⁸ Morgenthau, "Another Great Debate: The National Interest of The US" dalam Michael Smith et al. *Perspective On World Politics*, Routledge, London; hal 49

ketahanan keamanan. Dengan demikian diharapkan kepentingan luar negeri Indonesia di politik Internasional dapat terpenuhi. Dalam kasus hubungan antara pertahanan keamanan dan politik luar negeri Indonesia maka yang dimaksud dengan elemen perubah adalah pandangan mata berbagai negara terhadap citra Indonesia mengalami penurunan. Dengan kata lain elemen perubah adalah sebab sedangkan elemen logis adalah akibat.

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap politik luar negeri Indonesia dapat dilihat dari pemenuhan tujuan dari kebijakan luar negeri Indonesia. Tujuan kebijakan luar negeri dapat di dasarkan Indonesia pada tujuan Kementerian Luar Negeri Indonesia yang mengidentifikasi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peningkatan dan penguatan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional di berbagai bidang di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
- b) Meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara dan organisasi internasional di kawasan Amerika dan Eropa.
- c) Mewujudkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN, ikut mendorong proses integrasi komunitas ASEAN 2015 yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang mandiri, maju, bersatu, demokratis, aman, adil, makmur dan sejahtera.
- d) Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, serta meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial budaya, keuangan,

lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerja sama regional dan multilateral.

- e) Memperkuat citra Indonesia melalui penyediaan informasi yang akurat dan peningkatan pemahaman pemangku kepentingan di dalam negeri dan masyarakat internasional terhadap politik luar negeri.
- f) Mengoptimalkan diplomasi melalui pengelolaan hukum dan perjanjian internasional yang aman dari aspek politik, hukum, teknis dan keamanan.
- g) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri.
- h) Meningkatkan kualitas politik luar negeri, melalui pengkajian dan pengembangan kebijakan, sehingga mampu memperjuangkan kepentingan nasional secara efektif.
- i) Meningkatkan kualitas pengawasan intern Kementerian Luar Negeri untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j) Meningkatkan struktur kelembagaan, SDM, sarana prasarana, koordinasi perencanaan, pengelolaan, pelaporan kinerja dan anggaran serta dukungan administratif lainnya bagi keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri.

Tujuan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia tersebut selanjutnya diannakan neneliti sebagai dasar terhadap keberhasilan pemenuhan

kepentingan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negeri.

E. Hipotesa

Berdasarkan uraian kerangka teori diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan pertahanan keamanan pemerintah Indonesia mendukung terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan politik luar negeri Indonesia. Keberhasilan pencapaian tujuan PLNRI mendukung ketahanan nasional di bidang Pertahanan dan Keamanan.

F. Tujuan Penelitian

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesa tentang hubungan antara kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan ketahanan nasional terhadap keberhasilan/pemenuhan kepentingan politik luar negeri pemerintah Indonesia yaitu pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2008.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang dinamika kebijakan pertahanan Indonesia dan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2008.

3. Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi persyaratan kelulusan sarjana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah
Yogyakarta.

G. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan untuk meneliti dalam tulisan ini dibedakan menjadi dua, yang pertama metode pengumpulan data dan yang kedua metode analisis data.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah penguasaan dokumen. Penulis akan mengumpulkan informasi tentang pentingnya ketahanan nasional dan politik luar negeri Indonesia. Dengan mengumpulkan data dari buku-buku tentang politik luar negeri selain itu penulis juga menghimpun data dari jurnal, majalah, ensiklopedia, surat kabar, dan media informasi lainnya, seperti internet.

2. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Segala aspek dalam hal ketahanan nasional di Indonesia akan menjadi kajian dan sasaran utama. Sedangkan teori akan dijadikan alat untuk menganalisis fakta dan data yang diperoleh.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka memberi batasan agar penulisan skripsi ini tidak meluas maka penulis membatasi penelitian ini yaitu dari tahun 2004 sampai 2008.

Dipilihnya periode tahun tersebut karena peneliti berpendapat periode waktu tersebut dapat merepresentasikan hubungan yang timbul antara kebijakan pertahanan serta pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Hal ini dapat merepresentasikan dinamika pelaksanaan pertahanan keamanan Indonesia serta kebijakan luar negeri pasca Orde Baru. Jangkauan penelitian dengan batasan waktu tersebut tidak mengabaikan kejadian yang ada sebelum dan sesudahnya, selama hal ini masih memiliki relevansi dengan masalah diatas.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi atas 5 bab yang terbagi masing-masing sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang politik luar negeri, politik luar negeri Indonesia dan ketahanan nasional.

Bab III membahas tentang langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menstabilkan kondisi pertahanan menyangkut perkembangan militer namun juga reformasi pertahanan (termasuk undang-undang), melibatkan pihak sipil sebagai langkah pemberdayaan masyarakat serta langkah diplomasi.



BAB II

DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI

DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA PASCA REFORMASI

Dalam bab ini akan menguraikan dasar kebijakan luar negeri Indonesia yang di dasarkan pada politik luar negeri. Kenyataannya dinamika politik luar negeri suatu negara sesungguhnya juga merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Oleh karenanya dalam perkembangan kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh Indonesia berbeda pada setiap masa kepemimpinan yang berbeda pula. Setelah memasuki rezim Orde Baru, sifat politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif tersebut berganti dengan politik yang bersifat kooperatif. Pada rezim Orde Baru, hubungan yang tidak baik dengan Barat mulai diperbaiki. Hal ini dilakukan terutama karena orientasi politik luar negeri Indonesia berubah haluan menjadi pembangunan ekonomi dalam negeri melalui kerja sama dengan negara-negara lain.

Pada masa pemerintahan Habibie maka secara substansif tidak berbeda namun dalam pelaksanaannya mengalami banyak hambatan terutama dikaitkan dengan turunnya citra politik Indonesia pasca reformasi. Demikian pula pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid dan Megawati yang mengalami banyak permasalahan pertahanan keamanan yang kemudian makin memperburuk citra Indonesia di mata Internasional. Barulah pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengalami legitimasi penuh masa pemulihan kembali

dilakukan baik dalam bidang pertahanan keamanan dalam meningkatkan citra politik Indonesia. Secara lebih lengkap pembahasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

A. Dasar Serta Perumusan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Analisa mengenai dasar serta perumusan kebijakan luar negeri Indonesia merupakan upaya peneliti untuk mengkaji apa yang melandasi semua kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin Indonesia. Dasar menjadi sesuatu hal paling pokok dalam pembuatan kebijakan meskipun Indonesia telah mengalami pergantian kepemimpinan. Dengan demikian analisa mengenai dasar serta proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia memberikan arahan dasar bagaimana pemerintah Indonesia menjalankan sistem politik luar negeri sekaligus mendukung pemenuhan kepentingan Indonesia sendiri.

Dasar kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut 1). Politik damai dan hidup berdampingan secara damai. 2). Politik tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. 3. Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik dan lain-lain. 4. Politik berdasarkan piagam PBB. Khususnya terhadap prinsip bebas-aktif telah mengamanatkan untuk menempatkan bangsa Indonesia sebagai subyek yang berhak menentukan sikap dan tujuannya sendiri dan bukannya sebagai obyek dalam pergaulan internasional. Kenyataannya dinamika politik luar negeri suatu negara sesungguhnya juga merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari

politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Demikian pula halnya dengan politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain posisi geografis yang strategis, yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudra; potensi sumber daya alam dan manusia berikut susunan demografi; dan sistem sosial-politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara kita memposisikan diri di forum internasional.¹⁹

Dalam perkembangannya, khususnya pasca reformasi maka terdapat beberapa perubahan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu: *Pertama*, perumusan kebijakan dan pelaksanaan politik luar negeri tak lagi tersentralisasi di badan eksekutif atau di tangan presiden. Dengan tema-tema hubungan internasional seperti hak asasi manusia, demokratisasi, lingkungan hidup dan terciptanya masyarakat madani, maka rakyat seluruhnya memiliki akses dalam memberikan pemikiran, menilai dan ikut memikirkan arah kebijakan luar negeri. *Kedua*, melibatkan masyarakat terhadap pelaksanaan agenda reformasi sehingga politik luar negeri benar-benar membawa tuntutan masyarakat. Kesadaran ini muncul setelah masuknya pemikiran bahwa politik luar negeri itu tak lain daripada perjuangan seluruh bangsa Indonesia yang pada awalnya mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan pengakuan internasional.²⁰

¹⁹ M. Riza Sihbudi, *Indonesia-Timur Tengah, Masalah dan Prospek*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, hal. 1

²⁰ Anonymus. 2009. Diplomasi Soekarno Hingga SBY Prinsip Politik Luar Negeri. Melalui <http://masniam.wordpress.com/2009/04/02/landasan-politik-luar-negeriindonesia>

Pertama, sejak tahun 1999 setelah ditetapkannya UU Hubungan Luar Negeri (UU No. 37 Tahun 1999), untuk pertama kali dalam sejarah, Indonesia memiliki sebuah Undang-undang yang mengatur hubungan luar negeri. Kedua, dengan adanya UU Nomor 37 tersebut, praktis merubah struktur politik luar negeri Indonesia, termasuk struktur pengambilan keputusan, pertanggungjawaban dan pembiayaan politik luar negeri Indonesia. Apabila selama masa Orde Baru, struktur pengambilan politik luar negeri didominasi oleh kelompok elit, yaitu Presiden (*center of power*), militer (link keamanan), Departemen Luar Negeri (link diplomasi), dan Bappenas (link ekonomi). Dengan adanya UU nomor 37 peran lembaga perwakilan rakyat tidak bisa diabaikan. DPR, melalui Komisi 1 yang membidangi masalah Luar Negeri, secara aktif dan kontinyu berpeluang melakukan pengawasan (hak kontrol) dan penentuan anggaran (hak budget) terhadap proses penyusunan, kebijakan dan implementasi politik luar negeri. Ketiga, sejalan dengan proses demokratisasi, terjadi pula demokratisasi politik luar negeri Indonesia. Dengan meningkatnya peran DPR dalam penentuan kebijakan dan kebebasan pers untuk meliput politik luar negeri di ruang parlemen, membawa perubahan mendasar dalam hal relasi antara isu politik luar negeri dan publik Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat adanya perubahan; politik luar negeri yang sebelumnya merupakan wilayah elit politik, kini menjadi isu publik.²¹

²¹ Andre H. Pareira, "Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia Kontemporer", Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vol. 1 No. 2, Jakarta, Mei 2005, hal. 149-159

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat empat dasar dalam kebijakan luar negeri Indonesia yaitu 1. Politik damai dan hidup berdampingan secara damai. 2. Politik Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. 3. Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik dan lain-lain. 4. Politik berdasarkan piagam PBB khususnya terhadap prinsip bebas-aktif. Untuk proses perumusan kebijakan luar negeri maka tidak hanya berpusat pada presiden serta kementerian luar negeri. Peran rakyat juga menentukan arahan kebijakan luar negeri melalui komisi satu Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menjadi perbedaan proses perumusan kebijakan luar negeri antara pemerintahan Indonesia masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru.

B. Dinamika Kebijakan Luar Negeri

Khususnya bentuk pelaksanaan kebijakan luar negeri pasca reformasi juga dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan yang telah berlangsung empat kali menandakan maju mundurnya proses demokrasi di Indonesia yang juga mempengaruhi kebijakan negara dalam mencapai tujuan dari diplomasi. Pada setiap periode pemerintahan juga terjadi pemaknaan yang bervariasi terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Perbedaan interpretasi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara itu, terdapat prinsip atau landasan yang tetap dipertahankan, namun mengalami

persoalan dalam relevansi dan dilema karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan situasi yang demikian cepat. Hal ini yang kemudian menjadi dinamika perubahan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia pasca reformasi.

Untuk lebih mendetail maka peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

1. Masa Orde Baru (Masa Kepemimpinan Soeharto)

Pergantian kekuasaan dari rezim Orde Lama yang dipimpin Soekarno menuju rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto memberikan perubahan yang cukup mendasar dalam sifat diplomasi Indonesia. Soekarno dengan haluan politik luar negeri yang revolusioner dan anti imperialisme bersifat sangat konfrontatif. Sebaliknya, setelah memasuki rezim Orde Baru, sifat politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif tersebut berganti dengan politik yang bersifat kooperatif. Pada rezim Orde Baru, hubungan yang tidak baik dengan Barat mulai diperbaiki. Hal ini dilakukan terutama karena orientasi politik luar negeri Indonesia berubah haluan menjadi pembangunan ekonomi dalam negeri melalui kerja sama dengan negara-negara lain. Walaupun Orde Baru dianggap bobrok, namun kekuatan diplomasi Indonesia dianggap kembali pada kejayaannya dengan kembali diperhitungkannya keberadaan Indonesia dalam kancah politik dan ekonomi Indonesia dinandang sebagai negara tempat berinvestasi

yang menjanjikan dan suara Indonesia didengarkan di kawasan Asia Tenggara.²²

Pada masa orde baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya adalah ketetapan MPRS No. XII/ MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. TAP MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah: 1. Bebas aktif, anti-imperealisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Mengabdikan kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa untuk melakukan pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar. Karenanya kerja sama dengan negara-negara lain ini mulai dibuka untuk mendapatkan bantuan luar negeri demi melaksanakan pembangunan ekonomi dalam negeri.

Diplomasi yang dilakukan oleh Orde Baru banyak disebut sebagai "Diplomasi Pembangunan" (*Diplomacy For Development*). Salah satu hasil diplomasi pembangunan Orde Baru terkait dengan upaya untuk mendapatkan bantuan luar negeri adalah *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI/Kelompok Antarpemerintah Mengenai Indonesia). Usaha untuk membentuk IGGI tersebut mulai dilakukan pada bulan September

²² Bandoro, Bantarto (ed), Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru. Jakarta:CSIS,

1966 dalam pertemuan antara 12 negara kreditor yang dilaksanakan di Tokyo untuk mengetahui rencana Indonesia dalam memperbaiki keadaan ekonomi dan evaluasi IMF akan rencana tersebut. Dalam forum ini, Indonesia berhasil menggalang dukungan dan menegosiasikan utangnya kepada para kreditor dalam forum Paris Club dan dirasakan perlunya forum antar pemerintah untuk membantu pembangunan di Indonesia, baik berupa dana maupun pemikiran. Kesepakatan untuk membentuk sebuah forum formal dalam rangka membantu perekonomian Indonesia dicapai pada pertemuan ini. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah keberhasilan diplomasi pembangunan waktu itu. Pada tanggal 20 Februari 1967, IGGI dibentuk melalui pertemuan formal di Amsterdam yang dihadiri oleh sejumlah negara kreditor utama dan lembaga Internasional. Diplomasi pembangunan Indonesia pada masa awal Orde Baru tersebut dapat dikatakan berhasil dalam memperoleh bantuan luar negeri. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diplomasi ekonomi, yaitu mengamankan *resources* ekonomi yang berasal dari luar negeri untuk pembangunan ekonomi luar negeri.²³

Dalam hal ini, *resources* ekonomi utama yang berusaha diamankan adalah bantuan luar negeri yang berasal dari negara – negara maju. Pembentukan IGGI ini dapat kita anggap sebagai pelaksanaan dari teori containment untuk mencegah Indonesia kembali memihak blok Timur seperti pada masa Demokrasi Terpimpin. Indonesia dinilai sebagai sebuah

²³ Djalal, Dr Hasjim, Respon dan Kebijakan RI Terhadap Dinamika Politik dan Keamanan Internasional, makalah dalam Seminar Indonesia dan Dinamika Internasional, Jakarta, 5 November

negara yang sangat strategis dalam pelaksanaan teori *containment* ini karena merupakan negara Asia Tenggara yang cukup terkemuka. Karena itu, penanaman pengaruh blok Barat pada Indonesia dinilai sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan pengaruh blok Barat di kawasan Asia Tenggara. Masuknya bantuan luar negeri tersebut juga bertujuan untuk mengendalikan berbagai kebijakan dalam negeri Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengamankan kepentingan para negara kreditor tersebut di Indonesia, terutama kepentingan ekonomi. Sesuai dengan perspektif realis yang menyatakan bahwa pemberian bantuan luar negeri pada dasarnya dilakukan atas dasar kepentingan negara pemberi bantuan tersebut. Pemberian bantuan dengan tujuan seperti ini membuat Indonesia terjebak dalam kondisi dependensi. Indonesia menjadi sangat tergantung dengan bantuan asing tersebut, yang terlihat dari dimasukkannya hutang luar negeri dalam daftar sumber dana APBN. Ketergantungan terhadap sumber pendanaan asing ini memungkinkan intervensi pihak asing terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dengan begitu, lewat bantuan luar negeri, maka negara-negara Barat dapat mengontrol kehidupan politik dan ekonomi dalam negeri. Hal ini terlihat dari penguasaan pihak asing terhadap sumber daya alam di Indonesia, kemudahan masuknya barang impor dari negara-negara Barat, dan berbagai kebijakan Pemerintah yang selalu memihak terhadap perusahaan asing jika terjadi konflik antara buruh lokal dan perusahaan asing tersebut.²⁴

²⁴ Moh Idris A. Sejarah Diplomasi Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Sosial dan Politik, 2001

Indonesia dalam hal ini berada dalam posisi sebagai negara perifer yang selalu bergantung pada negara – negara sentral. Indonesia diposisikan sebagai pemasok tenaga kerja yang murah serta bahan mentah dalam pembagian kerja global tersebut. Kondisi dependensia ini menjadi sebuah "bom waktu" bagi Indonesia. Terbukti, setelah Perang Dingin berakhir dan nilai strategis Indonesia dalam teori containment hilang, maka berbagai akses terhadap sumber pendanaan luar negeri tersebut menjadi sulit. Stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri menjadi terganggu dan akhirnya berpuncak pada terjadinya Krisis Moneter tahun 1998. Pihak asing pun telah menguasai banyak sumber daya strategis dalam negeri melalui berbagai perusahaan multinasional. Meski begitu, di luar berbagai efek negatif yang disebabkan oleh bantuan luar negeri yang masuk ke Indonesia, terbentuknya IGGI tetap dapat dilihat sebagai keberhasilan diplomasi pembangunan pertama Indonesia, karena merupakan bentuk kepercayaan luar negeri yang dilembagakan. Hal lain yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia dijelaskan secara lebih spesifik dan rinci pada TAP MPR RI No. II/ MPR/ 1983 yang menandakan bahwa Indonesia sudah mulai mengikuti dinamika politik internasional yang berkembang saat itu.²⁵

Indonesia berusaha untuk mengangkat hubungan yang lebih akrab dengan tetangga-tetangganya yang satu kawasan melalui peningkatan hubungan ASEAN. Dengan demikian, Soeharto mengalihkan prioritas

²⁵ ibid

politik luar negeri Indonesia dari lingkungan geografis yang lebih luas, yakni dari Gerakan Asia-Afrika dan Non Blok, ke lingkungan geografis yang lebih kecil. Soeharto berusaha untuk mengangkat regionalisme Asia Tenggara sebagai landasan politik luar negeri Indonesia. Ia memberikan prioritas yang paling utama kepada hubungan yang dekat dan harmonis melalui penggalangan kerja sama yang lebih mantap dengan Negara-negara tetangga karena di sinilah terletak kepentingan nasional kita yang paling vital. Karenanya penciptaan kestabilan dan kerja sama regional di Asia Tenggara mendapatkan prioritas yang tinggi.

Asia Tenggara yang diidam-idamkan Presiden Soeharto adalah suatu Asia Tenggara yang terintegrasi, ia menjadi benteng dan pangkalan paling kuat untuk menghadapi pengaruh ataupun intervensi dari luar. Ia juga harus mampus menghadapi imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun. Untuk mencapai peningkatan stabilitas dan pengembangan itulah Indonesia memprakarsai pembentukan ASEAN yang lebih terintegrasi melalui pembukaan jalan menuju Komunitas ASEAN yang diharapkan dapat memupuk dan membina kerja sama yang lebih erat dan berguna bagi pengembangan ketahanan masing-masing.²⁶

2. Masa Kepemimpinan BJ Habibie

Pemerintahan pasca-orde baru ini setidaknya secara substansif dalam landasan politik luar negerinya berusaha untuk menuju kembali kepada

²⁶ Shambazy Budiarto, *Politik Luar Negeri Indonesia: Dominasi Sosok Presiden Indonesia*,

masa kejayaan pada masa dulu. Indonesia yang tengah meniti jalan menuju demokrasi yang menyeluruh. Dalam kaitannya dengan kondisi dalam negeri, politik luar negeri Indonesia sejak kejatuhan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 tidak dapat dilepaskan dari perubahan politik secara besar-besaran yang mengikuti kejatuhan pemerintahan otoritarian tersebut. Pemerintahan Habibie, yang menggantikan Soeharto, merupakan salah satu contoh tepat untuk menggambarkan pertautan antara proses demokratisasi dan kebijakan luar negeri dari sebuah pemerintahan di masa transisi.²⁷

Di awal masa pemerintahannya, Habibie menghadapi persoalan legitimasi yang cukup serius. Tidak hanya menangani masalah ekonomi yang akut, ia juga harus menyelesaikan masalah HAM yang dihasilkan oleh pemerintahan terdahulu. Untuk hal ini, Habibie berusaha mendapatkan dukungan internasional melalui beragam cara. Diantaranya, pemerintahan Habibie menghasilkan dua Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan perlindungan atas hak asasi manusia antara lain: (1). UU No.5/1998 mengenai Pengesahan *Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (2). UU no.29/1999 mengenai Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*. Selain itu, pemerintahan Habibie pun berhasil mendorong ratifikasi empat konvensi internasional dalam masalah hak-hak pekerja. Pembentukan Komnas Perempuan juga

²⁷ http://fikiranbertindak.multiply.com/journal/item/3/POLITIK_LUAR_NEGERI_INDONESIA

dilakukan pada masa pemerintahan Habibie yang pendek tersebut. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Habibie menaikkan kembali derajat kepercayaan internasional terhadap Indonesia.²⁸

Habibie mampu memperoleh simpati dari IMF dan Bank Dunia dengan keputusan kedua lembaga tersebut untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi sebesar 43 milyar dolar dan bahkan menawarkan tambahan bantuan sebesar 14 milyar dolar. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun basis legitimasi dari kalangan domestik tidak terlampaui kuat, namun dukungan internasional yang diperoleh melalui serangkaian kebijakan untuk memberi citra positif kepada dunia internasional memberikan dukungan bagi keberlangsungan pemerintahan Habibie saat periode transisi menuju demokrasi dimulai.²⁹

Tetapi, Pemerintahan Habibie pula yang memberi pelajaran penting bahwa kebijakan luar negeri, sebaliknya, juga dapat memberi dampak negatif bagi kelangsungan pemerintahan transisi. Kebijakan Habibie dalam persoalan Timor-Timor menunjukkan hal ini dengan jelas. Habibie mengeluarkan pernyataan pertama mengenai isu Timor-Timor pada bulan Juni 1998 dimana ia mengajukan tawaran untuk pemberlakuan otonomi seluas-luasnya untuk provinsi Timor-Timor. Hingga pada akhirnya Indonesia harus kehilangan Timor-Timur melalui jajak pendapat. Aksi kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah referendum kemudian

²⁸ Hadi, Umar dan Wardana. Mewujudkan Kepedulian dan Keberpihakan: Potret Satu Tahun Pelaksanaan "Citizen Service" di Singapura. Jakarta: KBRI Singapura dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2008.

memojokkan pemerintahan Habibie. Habibie kehilangan legitimasi baik dimata masyarakat internasional maupun domestik. Di mata internasional, ia dinilai gagal mengontrol TNI, yang dalam pernyataan-pernyataannya mendukung langkah presiden Habibie menawarkan referendum, namun di lapangan mendukung milisi pro integrasi yang berujung pada tindakan kekerasan di Timor-Timor setelah referendum.³⁰

3. Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid

Pemilu pada 1999 membawa Abdurrahman Wahid sebagai presiden terpilih periode 1999-2001. Tidak banyak kemajuan yang terjadi pada masa pemerintahannya, terutama dalam politik luar negeri. Terlepas dari perjalanan transisi menuju demokrasi, kepercayaan internasional masih terasa rendah terhadap Indonesia. Hubungan sipil militer menjadi salah satu isu utama dalam perjalanan transisi menuju demokrasi di Indonesia. Dinamika hubungan sipil militer ini terutama terlihat dalam isu separatisme, baik di Aceh maupun Papua. Isu Timor Timor seperti menjadi contoh penting yang memperlihatkan keterkaitan antara faktor domestik (hubungan sipil militer) dan faktor eksternal (diplomasi dan politik luar negeri). Hubungan sipil militer merupakan salah satu isu utama dalam perjalanan transisi menuju demokrasi di Indonesia. Dinamika hubungan sipil militer ini terutama terlihat dalam isu separatisme, baik di Aceh maupun Papua. Isu Timor Timor seperti di uraikan diatas juga menjadi

³⁰Dermawan, P Yulius. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi. Bandung: Graha Ilmu Bandung. 2007.

contoh penting yang memperlihatkan keterkaitan antara faktor domestik (hubungan sipil militer) dan faktor eksternal (diplomasi dan politik luar negeri).³¹

Bila dalam periode Habibie terjadi hubungan saling ketergantungan antara pemerintahan Habibie dengan TNI, pada masa Abdurrahman Wahid terjadi *power struggle* yang intensif antara presiden Wahid dengan TNI sebagai akibat dari usahanya untuk menerapkan kontrol sipil atas militer yang subyektif sifatnya. Pasca reformasi, ketika Abdurrahman Wahid memimpin Indonesia, politik luar negeri Indonesia cenderung mirip dengan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh Soekarno pada masa orde lama, dimana lebih menekankan pada peningkatan citra Indonesia pada dunia internasional. Pada masa pemerintahannya, politik internasional RI menjadi tidak jelas arahnya. Hubungan RI dengan dunia Barat mengalami kemunduran setelah lepasnya Timor Timor. Salah satu yang paling menonjol adalah memburuknya hubungan antara RI dengan Australia. Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional, untuk itu dia melakukan banyak kunjungan ke luar negeri selama satu tahun awal pemerintahannya sebagai bentuk implementasi dari tujuan tersebut. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selama masa pemerintahannya yang singkat, Abdurrahman Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini,

³¹ Jemadu, Aleksius. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Bandung: Graha Ilmu. 2008.

selain isu Timor Timor, adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti dalam kasus Aceh dan isu perbaikan ekonomi. Namun, sebagian besar kunjungan-kunjungannya itu tidak memiliki agenda yang jelas. Bahkan, dengan alasan yang absurd, Wahid berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah rencana yang mendapat reaksi keras di dalam negeri. Dan dengan tipe politik luar negeri Indonesia yang seperti ini membuat politik luar negeri Indonesia menjadi tidak fokus yang pada akhirnya hanya membuat berbagai usaha yang telah dijalankan oleh Gus Dur menjadi sia-sia karena kurang adanya implementasi yang konkrit.³²

4. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Setelah Presiden Wahid diberhentikan pada tahun 2001, ia digantikan oleh Presiden Megawati yang menjabat sebagai wakil presiden pada saat itu. Sebagai presiden, Megawati secara ekstensif melakukan kunjungan ke luar negeri untuk memperoleh dukungan internasional. Megawati antara lain mengunjungi Rusia, Jepang, Malaysia, New York untuk berpidato di depan Majelis Umum PBB, Rumania, Polandia, Hungaria, Bangladesh, Mongolia, Vietnam, Tunisia, Libya, Cina dan juga Pakistan. Tetapi, Presiden Megawati menuai kritik dalam berbagai kunjungannya tersebut, baik mengenai frekuensi ataupun substansi dari berbagai lawatan tersebut. Mengingat, seringnya beliau berada di luar

³² Rudy T May, *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Sistem Internasional*

negeri untuk kunjungan kenegaraan padahal seorang presiden tidak diperbolehkan untuk berlama-lama ke luar negeri.

Diantara kontroversi tersebut adalah pembelian pesawat tempur Sukhoi dan helikopter dari Rusia yang merupakan buah dari kunjungan Megawati ke Moskow. Terlepas dari berbagai kunjungan formal tersebut, politik luar negeri Indonesia selama masa pemerintahan Megawati juga dipengaruhi beragam peristiwa nasional maupun internasional. Peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, pemboman di Bali 2002 dan hotel JW Marriott di Jakarta tahun 2003, penyerangan ke Irak yang dipimpin Amerika Serikat dan Inggris dan juga operasi militer di Aceh untuk menghadapi GAM merupakan beberapa variabel yang mewarnai dinamika internal dan eksternal Indonesia.³³

Variabel tersebut membawa persoalan turunan yang rumit. Misalnya, perang melawan terorisme di satu sisi mengharuskan Indonesia untuk membuka diri dalam kerjasama internasional. Di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi isu besar mengenai perlindungan terhadap kebebasan sipil di tengah proses demokratisasi, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa negara akan mendapatkan momentum untuk mengembalikan prinsip *security approach* di dalam negeri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa diplomasi Indonesia kembali menjadi aktif pada masa pemerintahan Megawati. Dalam pengertian bahwa pelaksanaan diplomasi di masa pemerintahan Megawati kembali ditopang

³³ Winarno, Budi. *Globalisasi : Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2008.

oleh struktur yang memadai dan substansi yang cukup. Bahkan Departemen Luar Negeri mengalami restrukturisasi guna memperbaiki kinerjanya. Restrukturisasi ini sangat tepat waktu mengingat perubahan global terjadi begitu cepat, terutama setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Perubahan cepat ini memaksa setiap negara untuk mampu beradaptasi dan mengelola arus perubahan tersebut.³⁴

5. Masa Kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono

Dengan kemenangan pada pemilu 2004, membawa Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memangku jabatan presiden dan wakil presiden. Kabinet ini meletakkan landasan operasional politik luar negerinya dalam tiga program utama nasional kebijakan luar negeri, yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009, yaitu: (1). pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. tujuan pokok dari upaya tersebut adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional. langkah ini sejalan dengan pidato Bung Hatta pada 15 Desember 1945, yang menyatakan bahwa “politik luar negeri yang dijalankan oleh negara mestilah sejalan dengan politik dalam negeri”. Seluruh rakyat harus berdiri dengan tegak dan rapat dibelakang pemerintah

³⁴ Wuryandari, Ganewati (ed). Politik Luar Negeri Indonesia Ditengah Pusaran Politik Domestik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

Republik Indonesia. Sebagaimana lebih lanjut disampaikan oleh Hatta, bahwa “persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam diplomasi yang dijalankan”.

(2) peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerja sama internasional, terutama kerjasama ASEAN dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai *concentric circle* utama politik luar negeri Indonesia. (3). Penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional. Komitmen terhadap perdamaian internasional relevan dengan tujuan hidup bernegara dan berbangsa, sebagaimana dituangkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.³⁵

Hal yang cukup mengejutkan mengenai politik luar negeri Indonesia adalah digalakkannya politik luar negeri dari “Bebas-Aktif yang menuju Dinamis- Proaktif”. Dalam pidato bersejarah, “Mendayung di Antara Dua Karang”, Bung Hatta mengatakan: “...mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus

³⁵ Bahasa, Angel & Peter Chalk 2001. Indonesia's Transformation and The Stability of Southeast

memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika. Beliau kemudian menggariskan bahwa Indonesia tidak boleh sekadar menjadi objek dalam percaturan internasional. Indonesia harus menjadi subjek yang dapat menentukan kebijakannya sendiri. Dalam pandangan Presiden Yudhoyono, prinsip bebas-aktif tidak berarti menjadikan Indonesia tidak berani bersikap. Dengan prinsip itu, Indonesia berjuang sebagai pelopor membebaskan bangsa-bangsa dari segala macam penjajahan dan aktif mendorong mewujudkan tata dunia baru yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan. Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa sudah waktunya Indonesia memiliki kebijakan luar negeri baru sesuai dengan perubahan dunia saat ini. Indonesia harus menegakkan harga dirinya dan tidak mengedepankan sikap emosional dalam menghadapi masalah internasional. Melihat realitas yang ada, dalam bersikap kita juga harus dapat memadukan aturan, nilai hubungan internasional, kondisi pasar dunia, demokrasi, dan rasionalitas. Karena itu, strategi polugri mendatang harus akomodatif agar mampu menghadapi berbagai perubahan dunia kontemporer.³⁶

Indonesia harus dapat menentukan skala prioritas, apakah fokus pada masalah multilateral, regional, ataukah bilateral. Selain itu, harus berani berpihak pada masalah-masalah yang tak kenal batas negara, seperti hak asasi manusia, lingkungan, gender, dan kemiskinan. Indonesia juga dituntut untuk menyelaraskan kemampuan dan kapasitasnya sendiri dan

³⁶ http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/articles_index/idx.asp? diakses pada tanggal 1 Mei 2011

mendefinisikan kepentingan nasionalnya dengan jelas. Paralel dengan itu, Indonesia tampaknya perlu prioritas kepada masalah regional dan bilateral yang secara langsung berdampak pada kepentingan nasional dan mampu meningkatkan *bargaining position* Indonesia di dunia.

Pemerintahan Indonesia pada akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mulai menunjukkan langkah-langkah tegas dalam menjalankan politik luar negerinya karena Indonesia bisa mengambil keputusannya sendiri dengan tidak ingin ikut-ikutan membentuk atau bergabung dalam aliansi tertentu sehingga Indonesia tidak memiliki musuh dalam konteks hubungan internasional. Selain itu pula, katanya, Indonesia juga tidak pernah menganggap negara mana pun sebagai ancaman sehingga semua negara sebetulnya mempunyai tataran yang sama dan setara. Posisi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif menjadikan Indonesia bisa memainkan peranannya dalam kancah dunia internasional, khususnya dalam menciptakan perdamaian dunia. Demikian juga untuk pelaksanaan politik di dalam negeri, pemerintah tetap menganut asas demokratis dalam upaya untuk menunjang politik luar negeri yang bebas aktif. Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjalankan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tetapi, Indonesia perlu membangun sebuah jangkar yang lebih kuat untuk peran regional dan globalnya dimasa depan memang diperlukan, tetapi tidak cukup.³⁷

³⁷ <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi> diakses pada tanggal 1 Mei 2011

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa terdapat permasalahan yang berbeda dihadapi pada saat pergantian kepemimpinan terjadi. Secara umum maka pasca reformasi, Indonesia mengalami permasalahan dalam politik luar negeri berkaitan dengan turunnya citra Indonesia di mata politik internasional. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah pertahanan keamanan yang terjadi di Indonesia. Khususnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masalah pertahanan keamanan tersebut menumpuk dan menjadi sebuah persoalan penting yang memaksa menjadi sebuah kepentingan nasional.

BAB III
KEBIJAKAN PERTAHANAN KEAMANAN
BANGSA INDONESIA PADA TAHUN 2004-2008

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai: *Pertama*, Langkah Pemerintah Indonesia Dalam Reformasi Pertahanan Keamanan yaitu berupa pembentukan Rangkaian Kebijakan Pertahanan Negara Sesuai Dengan Mandate Pasal 16 UU 3/2002, penegakan kontrol sipil obyektif dan menyusun ulang anggaran pertahanan Indonesia. *Kedua*, Penggunaan Langkah Pemberdayaan Masyarakat Sipil Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pertahanan dan *Ketiga*, Penggunaan Langkah Diplomasi Dalam Pelaksanaan Pertahanan Keamanan

A. Langkah Pemerintah Indonesia Dalam Reformasi Pertahanan Keamanan

Dalam sub bab ini maka peneliti akan menguraikan mengenai bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perubahan dalam bidang pertahanan keamanan. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan bahwa konsep pertahanan suatu negara merupakan faktor utama dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Suatu negara tidak akan bisa menjaga eksistensinya dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri apabila belum mampu untuk mempertahankan diri dari ancaman tersebut. Oleh karena eratnya kaitan pertahanan negara dengan harkat dan

martabat suatu bangsa, maka dengan adanya pertahanan negara yang memadai (Postur Pertahanan yang Kuat) akan membuat bangsa lain tidak memandang sebelah mata terhadap bangsa kita.

Hal inilah yang kemudian memunculkan reformasi pertahanan keamanan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Adanya keperluan yang mendesak dari strategi pertahanan yaitu adanya kerja sama dengan luar negeri, terkait dengan koordinasi antara instansi terkait. Departemen Pertahanan RI (Dephan) sejauh ini sudah mulai melakukan langkah-langkah terkait dengan kebijakan dasar politik luar negeri RI yang juga sedang dijalankan oleh Departemen Luar Negeri RI (Deplu) serta Markas Besar TNI (Mabes). TNI secara institusi telah memainkan peran positif dalam usaha menjalin kerjasama di bidang keamanan dengan mitra-mitra terdekatnya, seperti AS, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Departemen Luar Negeri sudah meminta pada Australia dan Selandia Baru agar ikut serta dalam perjanjian *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), suatu perjanjian yang akan menjamin terselenggaranya perdamaian dan kerjasama yang lebih intensif antara Negara-negara di kawasan tersebut, yang pada gilirannya akan menyumbangkan perdamaian yang menyeluruh di Asia.

Oleh karenanya dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mendesak untuk melakukan reformasi terhadap bidang pertahanan keamanan yang dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembentukan Rangkaian Kebijakan Pertahanan Negara Sesuai Dengan Mandate Pasal 16 UU 3/2002

Berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri Pertahanan merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan negara. Kebijakan-kebijakan tersebut ditetapkan dalam bentuk SK Menteri Pertahanan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok kebijakan. Kelompok pertama adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan strategi pertahanan, yaitu: (1) Kebijakan tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara, (2). Buku Putih Pertahanan; (3). Kebijakan Kerjasama Pertahanan Bilateral, Regional, Internasional. Kelompok kedua adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan/pengerahan kekuatan TNI, yaitu: (a). Kebijakan Umum tentang Tujuan Penggunaan Kekuatan TNI; (b). Kebijakan Umum tentang Tujuan Penggunaan Komponen Cadangan dan Pendukung Kelompok ketiga adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya pertahanan, yaitu: 1. Kebijakan Penganggaran Pertahanan Negara 2. Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan Negara 3. Kebijakan Perekrutan Komponen Pertahanan Negara 4. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Nasional 5. Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan 6. Kebijakan Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan 7. Kebijakan Pembinaan Kemampuan Pertahanan 8. Kebijakan Penggunaan Sumber Daya Nasional untuk

Perumusan seluruh rangkaian kebijakan pertahanan negara ini telah dimulai oleh Departemen Pertahanan dengan melakukan proses Kaji Ulang Pertahanan Negara (*Strategic Defense Review*). Kaji Ulang Pertahanan ini menjadi dasar perumusan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini akan berfungsi sebagai Strategi Raya (*Grand Strategy*) Pertahanan Indonesia.³⁸

Untuk merumuskan Strategi Raya Pertahanan Indonesia, pemerintah perlu segera membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Pembentukan DPN merupakan mandat pasal 15 UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Struktur dan anggota DPN sudah ditentukan oleh UU No. 3/2002 dan DPN diarahkan untuk memiliki fungsi terbatas pada pemberian nasehat kepada Presiden tentang perumusan Kebijakan Umum Pertahanan Negara serta tentang pengerahan kekuatan TNI. Pembentukan DPN merupakan upaya awal untuk membedakan antara tataran kewenangan dalam penyelenggaraan pertahanan negara pada umumnya, dan tataran kewenangan yang secara khusus berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, negara mendelegasikan wewenang yang lebih besar kepada TNI untuk mengambil keputusan-keputusan strategi militer secara otonom (*autonomous decision*). Namun Panglima TNI harus tetap melaporkan pelaksanaan operasi militer kepada Presiden secara periodik baik sebelum, pada saat, maupun setelah operasi militer dilaksanakan.

³⁸ Arah Kebijakan Pertahanan Negara 2004-2009 *Working Group on Security Sector Reform, Monograph No-5*, 31 Januari 2005 31

Dalam kaitan ini Presiden dan Panglima TNI tetap perlu melakukan koordinasi dengan Dewan Pertahanan Nasional. Penyelenggaraan sistem pertahanan negara membutuhkan keterlibatan insititusi-institusi sipil dibutuhkan untuk menjamin bahwa TNI memiliki kesiapan dan hanya akan menggunakan kekuatan bersenjata dalam rangka pertahanan negara.

Berdasarkan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, jaminan ini dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, pemerintahan sipil merumuskan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Perumusan ini dilakukan oleh Presiden dengan melibatkan Dewan Pertahanan Nasional (yang anggotanya terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Pejabat-pejabat pemerintah dan non-pemerintah) serta Departemen Pertahanan. Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini dioperasionalisasikan oleh Menteri Pertahanan dengan merumuskan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara dan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan TNI.

Oleh Panglima TNI, seluruh kebijakan politik tentang pertahanan negara tersebut dijadikan pedoman untuk merencanakan pengembangan strategi-strategi militer. Perumusan dan pelaksanaan rangkaian kebijakan pertahanan negara ini secara berkala diawasi oleh DPR. Keterlibatan DPR dalam sistem pertahanan negara dilakukan pada saat negara mengumumkan deklarasi perang atau saat Presiden (dengan persetujuan DPR) memerintahkan pengerahan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman militer. Keputusan politik ini dilaksanakan oleh Panglima TNI

dengan melakukan berbagai operasi militer. Agenda kedua adalah penegakan kontrol sipil efektif. Pelaksanaan kontrol sipil efektif ini akan sepenuhnya tergantung dari kapasitas pemerintah dan DPR untuk mengawasi penggunaan anggaran pertahanan.

Pekerjaan Rumah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menegakkan kontrol sipil efektif ini adalah (1) menyusun mekanisme penganggaran baru sesuai dengan prinsip APBN Kinerja terutama untuk menjamin bahwa seluruh kebutuhan TNI dapat dipenuhi seluruhnya oleh APBN; (2) bersama DPR, menetapkan mekanisme pertanggung-jawaban pengelolaan anggaran pertahanan dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi; serta (3) sesuai mandat UU TNI, menyusun alternatif-alternatif model pengambil-alihan aktivitas bisnis militer oleh negara.

2. Penegakan kontrol sipil obyektif.

Gagasan kontrol sipil obyektif pada dasarnya menempatkan TNI sebagai evaluator diri (*self-evaluator*) bagi terbentuknya TNI yang profesional. Untuk menegakkan kontrol sipil obyektif, Departemen Pertahanan diharapkan dapat meminta Mabes TNI untuk menyusun kerangka program "militerisasi militer" yang terdiri atas (1) pembentukan gugus tugas serta penetapan kerangka waktu redefinisi Doktrin TNI serta tiga Doktrin Angkatan; (2) penyusunan rancangan kode etik militer; (3) penetapan kerangka waktu proses revisi kurikulum pendidikan militer; (4) rancangan penataan ulang gelar kekuatan TNI.

Ketiga agenda kebijakan tersebut akan diimplementasikan oleh TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Untuk itu, pemerintah harus memperkuat TNI sebagai alat negara dalam bidang pertahanan negara dengan empat cara. Pertama, pemerintah harus meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI. Profesionalisme TNI dikembangkan berdasarkan pada kompetensi teknis, kode etik, dan tata laku korps TNI.³⁹

Secara operasional, pengembangan profesionalisme TNI dilakukan dengan: (1) menyempurnakan sistem rekrutmen, pendidikan dan latihan yang memungkinkan setiap prajurit TNI mampu melakukan operasi militer perang dan operasi militer selain perang; (2) menyempurnakan kode etik dan tata laku korps TNI; (3) merumuskan aturan pelibatan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang; (4) menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan disiplin prajurit yang dilakukan oleh prajurit TNI. Kesejahteraan Prajurit TNI merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme TNI. Untuk itu, pemerintah harus menjamin kebutuhan hidup dan kesejahteraan prajurit secara layak.

Hal ini dilakukan dengan tiga cara: (a) meningkatkan pendapatan prajurit TNI secara bertahap; (b) meningkatkan kualitas fasilitas perumahan; dan (c) meningkatkan asuransi kesehatan dan dana pensiun prajurit TNI.

³⁹ Redefinisi, reposisi dan reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa”, Pokok-pokok Kebijakan Menhankam/Pangah Edisi 2 Jakarta: Markas Besar ABRI, Cilangkap, Jakarta 1999

3. Menyusun ulang anggaran pertahanan Indonesia.

Prinsip utama yang harus ditegakkan disini adalah pemerintah harus menyediakan seluruh kebutuhan pertahanan negara untuk membentuk TNI yang tangguh dan profesional. Prinsip ini juga disertai dengan keharusan bagi adanya akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran pertahanan. Untuk periode 2004-2009, pemerintah harus dapat; (1) menghilangkan sumber-sumber pendapatan institusi TNI di luar anggaran negara; dan (2) menata ulang struktur dan program anggaran pertahanan sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.⁴⁰

Penyusunan ulang anggaran pertahanan Indonesia ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia. Usaha penguatan kemampuan pertahanan ini merupakan cara ketiga yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperkuat TNI. Pada dasarnya, pengembangan kekuatan pertahanan harus didasarkan pada dinamika lingkungan strategis, perkembangan teknologi persenjataan, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, dan ketersediaan sumber daya pertahanan.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat tiga langkah yang dilakukan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam melakukan reformasi pertahanan keamanan, yaitu: (1) Pembentukan Rangkaian Kebijakan Pertahanan Negara Sesuai Dengan Mandate Pasal 16 UU 3/2002 dengan melakukan proses Kaji Ulang

⁴⁰ Arah Kebijakan Pertahanan Negara 2004-2009 Working Group on Security Sector Reform,

Pertahanan Negara (*Strategic Defense Review*). Kaji Ulang Pertahanan ini menjadi dasar perumusan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini akan berfungsi sebagai Strategi Raya (*Grand Strategy*) Pertahanan Indonesia. (2) Penegakan kontrol sipil obyektif yang menempatkan TNI sebagai evaluator diri (*self-evaluator*) bagi terbentuknya TNI yang profesional. (3) Menyusun ulang anggaran pertahanan Indonesia dengan menyediakan seluruh kebutuhan pertahanan negara untuk membentuk TNI yang tangguh dan professional.

B. Penggunaan Langkah Pemberdayaan Masyarakat Sipil Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pertahanan

Dalam sub bab ini merupakan langkah lain yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pertahanan keamanan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia masa Susilo Bambang Yudhoyono. Langkah ini menjadi langkah yang berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya yaitu memasukkan unsur masyarakat sipil sebagai salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pertahanan. Dengan demikian kekuatan negara dalam melaksanakan kebijakan pertahanan keamanan tidak hanya terletak pada unsur militer saja. Diantaranya sebagai pengambil keputusan serta sebagai unsur yang ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan pertahanan keamanan yang dilakukan oleh pihak pengambil kebijakan (pemerintah) dan militer. Untuk lebih lanjut maka akan diuraikan sebagai berikut:

Masuknya peranan pemberdayaan masyarakat sipil disebut sebagai Konsep pemanfaatan sipil dan kondisi-kondisi darurat (Sishankamrata). Dalam hal ini masyarakat sipil mempunyai fungsi sama penting dengan peranan yang dilakukan oleh pihak militer. Kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sector keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. Masyarakat sipil harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas masyarakat sipil tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar.

- a. Masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain:
- b. Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan .
- c. Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait.
- d. Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik

- e. Membagi informasi dan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat kebijakan, parlemen dan media.
- f. Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun perspektif-perspektif sosial yang ada.
- g. Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal .
- h. Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan.
- i. Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik .
- j. Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen.
- k. Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan.
- l. Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan.
- m. Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan.
- n. Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan.
- o. Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan.
- p. Mempromosikan pemerintah yang responsive.
- q. Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level eksekutif sesuai dengan kepentingan

- r. Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam rejim demokratis dan non demokratis.
- s. Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional yang non demokratis dan non representative.⁴¹

Peranan masyarakat sipil dalam pelaksanaan kebijakan pertahanan juga dilakukan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan. Dalam konsep negara demokrasi seperti yang dilaksanakan oleh Indonesia saat ini maka keamanan pertahanan tidak dapat berdiri sendiri. Aktor keamanan haruslah akuntabel dan operasi mereka harus diawasi oleh otoritas sipil dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Operasi aktor keamanan harus sejalan dengan sistem hukum nasional dan internasional. Ketersediaan semua informasi mengenai perencanaan, penganggaran dan operasi para aktor keamanan yang dapat diakses oleh publik secara luas serta pengadopsian sebuah pendekatan yang komprehensif dan disiplin atas semua sumber daya yang ada. Badan legislatif dan eksekutif harus mempunyai kapasitas untuk melakukan kontrol politik terhadap berbagai kebijakan, penganggaran dan operasi para aktor di bidang keamanan.

Sejalan dengan prinsip ini, masyarakat sipil juga harus mempunyai kapasitas untuk mengawasi dan berpartisipasi secara konstruktif kebijakan,

⁴¹ Al Araf, Peran Parlemen dalam Reformasi Sektor Keamanan, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit, Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) 2006

penganggaran dan operasi aktor keamanan hubungan sipil-militer harus didasarkan pada hierarki yang jelas dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Kesetaraan individu harus dijamin di depan hukum maupun dalam proses hukum berdasar tata cara yang adil dan transparan.⁴²

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa langkah pemberdayaan sipil dalam peningkatan pertahanan keamanan yaitu: Masyarakat sipil harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar.

Peranan masyarakat sipil dalam pelaksanaan kebijakan pertahanan juga dilakukan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan harus mempunyai kapasitas untuk mengawasi dan berpartisipasi secara konstruktif kebijakan, penganggaran dan operasi aktor keamanan hubungan sipil-militer harus didasarkan pada hierarki yang jelas dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

⁴² Anak Agung Banyu Perwita (eds), Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, 2006, Propatria

C. Penggunaan Langkah Diplomasi Dalam Pelaksanaan Pertahanan Keamanan

Diplomasi memiliki peran yang sangat beragam dan banyak untuk bermain didalam hubungan internasional. Upaya manusia untuk memecahkan persoalan perang dan damai telah dianggap sebagai metode manusia yang paling tua. Dalam menjalankan hubungan antara masyarakat yang terorganisasi yaitu diplomasi dengan penerapan metode negosiasi, persuasi, tukar pikiran dan sebagainya dapat mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan yang sering tersembunyi di latar belakang. Di dalam dunia yang terdiri dari berbagai negara berdaulat ini dua faktor yaitu diplomasi dan hukum internasional merupakan paling penting dalam pemeliharaan pertahanan keamanan. Di samping hukum internasional telah memberikan tatanan bagi dunia yang bagaimanapun anarkis namun bagi pemeliharaan pertahanan keamanan maka penggunaan langkah diplomasi telah selalu memainkan peran yang vital.⁴³

Diplomasi yang digambarkan sebagai "*The Politics of International Relations*" dalam sejarahnya terus berkembang sebagai suatu metode yang berhubungan dengan dunia yang keras dimana berlaku sistem hubungan antar bangsa negara yang kompetitif sifatnya. Negara-negara saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya, memajukan kepentingan-kepentingan nasional mereka dan bahkan menguasai negara lain. Persaingan antar negara tersebut

⁴³ Tri Nuke Pudjiastuti (2007). Mencermati Kembali Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian Politik : Jakarta, hal : 9

terus berlanjut karena mereka mengejar tujuan masing-masing dan sering satu negara mengejar.⁴⁴

Oleh karenanya muncul upaya untuk mengoptimalkan diplomasi sebagai garis depan pertahanan Indonesia untuk menghilangkan intensi dan situasi yang akan memicu konflik. Konflik tersebut bisa berupa konflik-konflik internal yang bisa berupa gerakan separatis bersenjata dan/atau konflik komunal yang melibatkan kekerasan bersenjata. Konflik ini akan termanifestasi menjadi konflik bersenjata jika terjadi kegagalan beruntun dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengelola konflik secara konstruktif. Konflik ketiga adalah konflik-konflik transnasional seperti terorisme, penyelundupan senjata, dan bajak laut. Konflik-konflik ini memiliki karakter baru seperti optimalisasi jejaring internasional, intensitas konflik yang cenderung kecil, dan daerah sebaran konflik yang luas. Kekuatan pertahanan Indonesia tidak dirancang untuk menghadapi konflik-konflik transnasional sehingga perlu ada proses transformasi kekuatan melalui diplomasi yang signifikan.⁴⁵

Usaha-usaha Indonesia dalam menjalankan diplomasi berintikan peran pertahanan nirmiliter melalui politik dan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter lainnya disiap siagakan untuk memperkuat upaya diplomasi, sekaligus untuk melakukan tahapan lanjutan apabila diplomasi mengalami jalan buntu. Keberhasilan usaha-usaha

⁴⁴ S.L Roy (1991). *Diplomasi*. Rajawali Pers : Jakarta. hal : 23

⁴⁵ *Ilang Strategi Pertahanan Nasional Working Group on Security Sector Reform, Monograph*

diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi politik yang diperankan oleh unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yakni pengemban politik luar negeri.

Penggunaan langkah diplomasi tersebut membawa beberapa perubahan dalam pelaksanaan pertahanan. Hal ini dapat dilihat dari kembali terjalinnya hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat telah membuka jalan bagi TNI untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam berbagai sektor, dan sehubungan dengan semakin membaiknya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Terutama pasca-embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia. Kedua negara mengadakan Dialog Kerjasama Keamanan Amerika Serikat-Indonesia (Indonesia – U.S. Security Dialogue - IUSSD) yang pertama pada tahun 2002, yang merupakan forum kedua negara untuk saling berkomunikasi. Selain dialog, bentuk kerjasama juga dilakukan dalam latihan bersama dan bantuan militer. Tujuan dilaksanakan Indonesia-U.S. *Security Dialogue* adalah untuk membangun suatu saluran komunikasi dua arah antar Dephan dan institusi militer kedua negara, menciptakan sarana kepada pejabat pemerintah kedua negara untuk dapat saling bertukar pandangan dalam lingkup yang luas mengenai strategi keamanan nasional dan pertahanan, adanya pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi, konsepsi bahkan mengenai strategi keamanan nasional kedua negara, dan menghasilkan masukan-masukan yang positif bagi pemerintah masing-masing sebagai bahan untuk menentukan kebijakan politik selanjutnya.

Dalam dialog-dialog ini juga terungkap tentang adanya komitmen pemerintah

AS untuk mendukung integritas wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke disatu sisi, dan disisi lain pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk ikut bersama-sama AS dan komunitas internasional memerangi terorisme global. Kegiatan IUSSD telah dilaksanakan sebanyak 6 kali mulai tahun 2002 sampai dengan 2008.⁴⁶

Demikian pula diplomasi yang dilakukan Indonesia di kawasan ASEAN memberikan perkembangan positif dalam penanganan keamanan. Dalam bidang pemberantasan aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara yang memerlukan penanganan bersama seluruh negara anggota ASEAN, Indonesia tetap berupaya menghormati HAM dan kemanusiaan tidak hanya kepada korban tetapi juga pelaku dengan disepakatinya ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT) pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007. Sebagai bentuk pengakuan akan keberhasilan Indonesia mengatasi masalah terorisme yang menjadi referensi bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam penanganan masalah kejahatan lintas negara, upaya penegakan hukum di Indonesia melalui program rehabilitasi baik bagi pelaku maupun yang terkait dengan aksi terorisme telah diakui dan masuk dalam konvensi tersebut.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan Indonesia era Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan perbaikan dalam pertahanan keamanan yaitu (1) reformasi pertahanan

⁴⁶ (<http://www.denhan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=54>, diakses 1

keamanan; a) Pembentukan Rangkaian Kebijakan Pertahanan Negara Sesuai Dengan Mandate Pasal 16 UU 3/2002 dengan melakukan proses Kaji Ulang Pertahanan Negara (*Strategic Defense Review*). Kaji Ulang Pertahanan ini menjadi dasar perumusan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini akan berfungsi sebagai Strategi Raya (*Grand Strategy*) Pertahanan Indonesia. b) Penegakan kontrol sipil obyektif yang menempatkan TNI sebagai evaluator diri (*self-evaluator*) bagi terbentuknya TNI yang profesional. c) Menyusun ulang anggaran pertahanan Indonesia dengan menyediakan seluruh kebutuhan pertahanan negara untuk membentuk TNI yang tangguh dan professional.

(2) langkah pemberdayaan sipil dalam peningkatan pertahanan keamanan yaitu melalui melibatkan Masyarakat sipil dalam mengerahkan kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan, melibatkan peningkatan pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar. Di sisi lain peranan masyarakat sipil dalam pelaksanaan kebijakan pertahanan juga dilakukan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan harus mempunyai kapasitas untuk mengawasi dan berpartisipasi secara konstruktif kebijakan, penganggaran dan operasi aktor keamanan hubungan sipil-militer harus didasarkan pada hierarki yang jelas dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

(3) muncul upaya untuk mengoptimalkan diplomasi sebagai garis depan pertahanan Indonesia untuk menghilangkan intensi dan situasi yang akan memicu konflik. Usaha-usaha Indonesia dalam menjalankan diplomasi berintikan peran pertahanan nirmiliter melalui politik dan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter lainnya disiap siagakan untuk memperkuat upaya diplomasi, sekaligus untuk melakukan tahapan lanjutan apabila diplomasi mengalami jalan buntu. Keberhasilan usaha-usaha diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi politik yang diperankan oleh unsur-unsur pertahanan nirmiliter yakni peneoemban politik luar negeri.

C. Penggunaan Langkah Diplomasi Dalam Pelaksanaan Pertahanan Keamanan

Diplomasi memiliki peran yang sangat beragam dan banyak untuk bermain didalam hubungan internasional. Upaya manusia untuk memecahkan persoalan perang dan damai telah dianggap sebagai metode manusia yang paling tua. Dalam menjalankan hubungan antara masyarakat yang terorganisasi yaitu diplomasi dengan penerapan metode negosiasi, persuasi, tukar pikiran dan sebagainya dapat mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan yang sering tersembunyi di latar belakang. Di dalam dunia yang terdiri dari berbagai negara berdaulat ini dua faktor yaitu diplomasi dan hukum internasional merupakan paling penting dalam pemeliharaan pertahanan keamanan. Di samping hukum internasional telah memberikan tatanan bagi dunia yang bagaimanapun anarkis namun bagi pemeliharaan pertahanan keamanan maka penggunaan langkah diplomasi telah selalu memainkan peran yang vital.⁴³

Diplomasi yang digambarkan sebagai "*The Politics of International Relations*" dalam sejarahnya terus berkembang sebagai suatu metode yang berhubungan dengan dunia yang keras dimana berlaku sistem hubungan antar bangsa negara yang kompetitif sifatnya. Negara-negara saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya, memajukan kepentingan-kepentingan nasional mereka dan bahkan menguasai negara lain. Persaingan antar negara tersebut

⁴³ Tri Nuke Pudjiastuti (2007). Mencermati Kembali Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian Politik : Jakarta. hal : 9

terus berlanjut karena mereka mengejar tujuan masing-masing dan sering satu negara mengejar.⁴⁴

Oleh karenanya muncul upaya untuk mengoptimalkan diplomasi sebagai garis depan pertahanan Indonesia untuk menghilangkan intensi dan situasi yang akan memicu konflik. Konflik tersebut bisa berupa konflik-konflik internal yang bisa berupa gerakan separatis bersenjata dan/atau konflik komunal yang melibatkan kekerasan bersenjata. Konflik ini akan termanifestasi menjadi konflik bersenjata jika terjadi kegagalan beruntun dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengelola konflik secara konstruktif. Konflik ketiga adalah konflik-konflik transnasional seperti terorisme, penyelundupan senjata, dan bajak laut. Konflik-konflik ini memiliki karakter baru seperti optimalisasi jejaring internasional, intensitas konflik yang cenderung kecil, dan daerah sebaran konflik yang luas. Kekuatan pertahanan Indonesia tidak dirancang untuk menghadapi konflik-konflik transnasional sehingga perlu ada proses transformasi kekuatan melalui diplomasi yang signifikan.⁴⁵

Usaha-usaha Indonesia dalam menjalankan diplomasi berintikan peran pertahanan nirmiliter melalui politik dan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter lainnya disiap siagakan untuk memperkuat upaya diplomasi, sekaligus untuk melakukan tahapan lanjutan apabila diplomasi mengalami jalan buntu. Keberhasilan usaha-usaha

⁴⁴ S.L Roy (1991). *Diplomasi*. Rajawali Pers : Jakarta. hal : 23

⁴⁵ *Ulang Strategi Pertahanan Nasional Working Group on Security Sector Reform. Monograph*

diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi politik yang diperankan oleh unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yakni pengemban politik luar negeri.

Penggunaan langkah diplomasi tersebut membawa beberapa perubahan dalam pelaksanaan pertahanan. Hal ini dapat dilihat dari kembali terjalinnya hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat telah membuka jalan bagi TNI untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam berbagai sektor, dan sehubungan dengan semakin membaiknya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Terutama pasca-embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia. Kedua negara mengadakan Dialog Kerjasama Keamanan Amerika Serikat-Indonesia (Indonesia – U.S. Security Dialogue - IUSSD) yang pertama pada tahun 2002, yang merupakan forum kedua negara untuk saling berkomunikasi. Selain dialog, bentuk kerjasama juga dilakukan dalam latihan bersama dan bantuan militer. Tujuan dilaksanakan Indonesia-U.S. *Security Dialogue* adalah untuk membangun suatu saluran komunikasi dua arah antar Dephan dan institusi militer kedua negara, menciptakan sarana kepada pejabat pemerintah kedua negara untuk dapat saling bertukar pandangan dalam lingkup yang luas mengenai strategi keamanan nasional dan pertahanan, adanya pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi, konsepsi bahkan mengenai strategi keamanan nasional kedua negara, dan menghasilkan masukan-masukan yang positif bagi pemerintah masing-masing sebagai bahan untuk menentukan kebijakan politik selanjutnya. Dalam dialog-dialog ini juga terungkap tentang adanya komitmen pemerintah

AS untuk mendukung integritas wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke disatu sisi, dan disisi lain pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk ikut bersama-sama AS dan komunitas internasional memerangi terorisme global. Kegiatan IUSSD telah dilaksanakan sebanyak 6 kali mulai tahun 2002 sampai dengan 2008.⁴⁶

Demikian pula diplomasi yang dilakukan Indonesia di kawasan ASEAN memberikan perkembangan positif dalam penanganan keamanan. Dalam bidang pemberantasan aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara yang memerlukan penanganan bersama seluruh negara anggota ASEAN, Indonesia tetap berupaya menghormati HAM dan kemanusiaan tidak hanya kepada korban tetapi juga pelaku dengan disepakatinya ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT) pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007. Sebagai bentuk pengakuan akan keberhasilan Indonesia mengatasi masalah terorisme yang menjadi referensi bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam penanganan masalah kejahatan lintas negara, upaya penegakan hukum di Indonesia melalui program rehabilitasi baik bagi pelaku maupun yang terkait dengan aksi terorisme telah diakui dan masuk dalam konvensi tersebut.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan Indonesia era Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan perbaikan dalam pertahanan keamanan yaitu (1) reformasi pertahanan

⁴⁶ (<http://www.denhan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=54> diakses 1

keamanan; a) Pembentukan Rangkaian Kebijakan Pertahanan Negara Sesuai Dengan Mandate Pasal 16 UU 3/2002 dengan melakukan proses Kaji Ulang Pertahanan Negara (*Strategic Defense Review*). Kaji Ulang Pertahanan ini menjadi dasar perumusan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini akan berfungsi sebagai Strategi Raya (*Grand Strategy*) Pertahanan Indonesia. b) Penegakan kontrol sipil obyektif yang menempatkan TNI sebagai evaluator diri (*self-evaluator*) bagi terbentuknya TNI yang profesional. c) Menyusun ulang anggaran pertahanan Indonesia dengan menyediakan seluruh kebutuhan pertahanan negara untuk membentuk TNI yang tangguh dan professional.

(2) langkah pemberdayaan sipil dalam peningkatan pertahanan keamanan yaitu melalui melibatkan Masyarakat sipil dalam mengerahkan kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan, melibatkan peningkatan pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar. Di sisi lain peranan masyarakat sipil dalam pelaksanaan kebijakan pertahanan juga dilakukan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan harus mempunyai kapasitas untuk mengawasi dan berpartisipasi secara konstruktif kebijakan, penganggaran dan operasi aktor keamanan hubungan sipil-militer harus didasarkan pada hierarki yang jelas dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

(3) muncul upaya untuk mengoptimalkan diplomasi sebagai garis depan pertahanan Indonesia untuk menghilangkan intensi dan situasi yang akan memicu konflik. Usaha-usaha Indonesia dalam menjalankan diplomasi berintikan peran pertahanan nirmiliter melalui politik dan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter lainnya disiap siagakan untuk memperkuat upaya diplomasi, sekaligus untuk melakukan tahapan lanjutan apabila diplomasi mengalami jalan buntu. Keberhasilan usaha-usaha diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi politik yang diperankan oleh unsur-unsur pertahanan nirmiliter yakni nengemhan nolitik luar negeri.

BAB IV

PENCAPAIAN TUJUAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDONESIA MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai tujuan pemenuhan kepentingan luar negeri sesuai dengan tujuan kementerian luar negeri Indonesia. Dalam hal ini akan diuraikan melalui langkah-langkah yang paling menonjol dilakukan oleh Indonesia, yaitu: *Pertama*, efektifitas dalam meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara dan organisasi internasional di kawasan Amerika dan Eropa; *Kedua*, pemenuhan dalam upaya mewujudkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN; *Ketiga*, efektifitas dalam pemenuhan upaya memperkuat citra Indonesia dan *Keempat*, mengoptimalkan diplomasi melalui pengelolaan hukum dan perjanjian internasional. Lebih lengkap akan diuraikan sebagai berikut:

A. Mewujudkan Peningkatan Dan Penguatan Hubungan Dan Kerja Sama Bilateral Dan Regional Di Berbagai Bidang Di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Memasukkan tujuan peningkatan dan penguatan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional di berbagai bidang di kawasan Asia Pasifik dan Afrika sebagai bahan pertimbangan bahwa kawasan Asia Pasifik maupun Afrika merupakan kawasan dengan berbagai negara yang memiliki potensi pasar maupun kerjasama ekonomi. Selain itu terdapat beberapa permasalahan politik yang dapat diselesaikan melalui hubungan luar negeri yang baik.

diantaranya adalah perbatasan dengan negara Timor Leste dan Papua. Secara konflik perbatasan selalu akan ada potensi yang muncul namun terkait dengan dua negara tersebut belum memiliki hubungan diplomatik yang baik.

Selain itu Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjaga citra di mata Internasional dengan berupaya untuk lebih aktif dalam melakukan berbagai kegiatan politik, diantaranya adalah menjadi tuan rumah berbagai kegiatan serta ikut terlibat menjadi pihak penengah dalam berbagai konflik, terutama di kawasan Palestina serta dalam konflik Lebanon dengan menjadi pasukan perdamaian PBB UNIFIL.

Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk ikut mengembangkan hubungan bilateral maupun regional dengan berbagai negara di kawasan ini. Hal ini kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Indonesia terus meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Afrika. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan tersebut tercermin dalam kunjungan para pejabat tinggi. Pada tahun 2004 Indonesia menerima kunjungan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Madagaskar, Menteri Luar Negeri (Menlu) Mozambique, Menteri Luar Negeri Tanzania, dan kunjungan pribadi Presiden Zimbabwe serta kunjungan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan. Sementara Menlu RI telah berkunjung ke Mozambique, Zimbabwe dan Swaziland; dalam kunjungan tersebut ketiga negara telah menyatakan

dukungannya secara tertulis bagi pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB Periode 2007-2008.

b. Indonesia juga berperan aktif dalam AASROC II di Durban, Afrika Selatan yang dihadiri oleh 81 negara Asia dan Afrika serta 5 organisasi Regional kedua benua. Pertemuan tersebut mendukung penyelenggaraan KTT Asia-Afrika pada tanggal 21-22 April 2005 di Bandung. Dalam rangka penyelenggaraan kedua acara tersebut, Indonesia selaku tuan rumah telah melakukan persiapan-persiapan baik fisik dan non fisik.⁴⁸

c. Hubungan kerjasama Indonesia-Jepang secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 Indonesia dan Jepang telah menandatangani dokumen kesepakatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, yakni *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Dalam kerangka kesepakatan IJEPA, pada tanggal 19 Mei 2008 telah ditandatangani MoU implementasi pengiriman perawat dan perawat lansia oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan *Japan International Cooperation Welfare Society* (JICWELS).

d. Selama ini Jepang juga banyak mendukung Indonesia dengan adanya komitmen memberikan bantuan baik berupa pinjaman maupun hibah untuk mendorong pembangunan di Indonesia, sedangkan dalam rangka sister city/province, saat ini terdapat 6 *sister city/province arrangements* yang

⁴⁸ Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru ,
<http://frenndw.wordpress.com/2010/01/13/politik-luar-negeri-indonesia-pasca-orde-baru/> diakses pada tanggal 1 Mei 2011

telah dikukuhkan dengan MoU yaitu Jakarta-Tokyo, Yogyakarta-Kyoto, Surabaya-Kochi, Medan-Ichikawa, JawaTimur-Osaka Prefecture dan Irian Jaya-Yamagata Prefecture.

- e. Demikian pula perkembangan hubungan Indonesia-Korea Selatan berjalan sangat baik terbukti dari terealisasi berbagai kesepakatan kerjasama baru seperti kerjasama pemberantasan korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Anti Corruption and Civil Right Commission* (ACRC), serta pembelian pesawat jenis CN235 dari Indonesia dan diharapkan akan terus berlanjut. Sementara itu, hubungan kerjasama Indonesia-Australia di berbagai bidang semakin meningkat ditandai dengan ditandatanganinya *Plan of Action for the implementation of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation dari Lombok Treaty*, di bidang pencegahan kejahatan transnasional di antaranya melalui kerjasama dalam kerangka Bali Regional Ministerial Conference on *People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime (Bali Process)*, dan di bidang kerjasama pembangunan Indonesia-Australia ke depan telah tertuang pada *Country Strategy Framework (CSF) 2008-2013*.⁴⁹
- f. Dalam Bali *Process* tersebut turut pula dibahas kasus pengungsi Rohingya bersama dengan kasus-kasus lain semacam yang melibatkan warga Sri Lanka dan Afghanistan terutama untuk menghasilkan berbagai upaya

⁴⁹ Sengketa Perbatasan Antar Negara Di Kawasan Asia Pasific,
<http://www.tnial.mil.id/Penpas/MajalahCakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/66/Default.aspx> diakses tanggal 3 Mei 2011

inovatif dalam penanganan penyelundupan dan perdagangan manusia. Terkait dengan pemulangan 43 pencari suaka asal Papua, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri RI menyampaikan nota protes dan sikap kecewa Indonesia atas sikap Australia yang menerima para pencari suaka asal Papua tersebut. Sementara itu, hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru menunjukkan peningkatan berarti melalui kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan, dan dukungan terhadap program-program yang dilaksanakan dalam kerangka *Bali Democracy Forum* (BDF).

- g. Dalam rangka menyelesaikan masalah residual Indonesia-Timor Leste, kedua negara telah membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) pada Maret 2005 dan telah menyampaikan laporan akhir serta rekomendasinya kepada Kepala Negara/Pemerintahan kedua negara pada 15 Juli 2008.
- h. Sejak dibukanya hubungan diplomatik Indonesia-Papua New Guinea (PNG), kedua negara terus melakukan konsultasi melalui berbagai pertemuan yang dilaksanakan seperti *Border Liaison Officer Meeting* (BLOM), *Joint Border Committee* (JBC) dan *Joint Ministerial Commission* (JMC). Dalam hal penghormatan pada kedaulatan bangsa dan integritas NKRI, Pemerintah PNG selalu menunjukkan dukungannya terhadap Indonesia yang ditunjukkan baik dalam forum-forum internasional seperti di PBB dan seluruh badan di bawahnya (*subsidiary organ*), maupun

organisasi regional seperti *Pacific Island Forum* (PIF), *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan LSM-LSM simpatisan OPM.

- i. Demikian pula dengan negara-negara sahabat lainnya, hubungan Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik selatan, kawasan Asia Selatan dan Tengah, Pakistan, Bangladesh, Iran dan Azerbaijan mengalami kemajuan yang signifikan. Hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat di kawasan Afrika juga berkembang semakin baik, sebagaimana juga hubungan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik yang ditujukan bagi pencapaian kepentingan nasional.
- j. Dalam mendukung proses perdamaian di Timur Tengah dan mendorong berdirinya sebuah negara Palestina yang bebas merdeka dengan ibukota di Yerusalem Timur dan hidup secara damai berdampingan dengan negara tetangga lainnya sesuai dengan *Annapolis Conference* 2007 yang menargetkan pencapaian *two-state solution*, Indonesia mendukung perlunya penyelesaian secara permanen status kota Yerusalem mengingat arti penting kota tersebut bagi tiga agama samawi. Pada saat pelaksanaan *the International Conference in Support of the Palestinian Economy for the Reconstruction of Gaza* pada 2 Maret 2009 yang baru lalu di Mesir
- k. Indonesia berkomitmen untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan fokus terutama pada bidang kesehatan, pembangunan infrastruktur serta tawaran berbagi pengalaman dan konsultasi dalam hal *managing the disaster* sebagaimana yang telah berhasil dilakukan saat menangani

kerusakan/korban bencana akibat Tsunami melalui Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR). Indonesia mengusulkan pembentukan satu badan serupa BRR dengan otoritas yang memadai serta dukungan dari semua pihak terkait. Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia terhadap Palestina tersebut, Pemerintah Indonesia hingga saat ini tengah mempersiapkan pengiriman *Fact-finding Team* ke Gaza untuk menelaah kebutuhan warga Palestina di lapangan sehingga penyaluran bantuan untuk Palestina dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemerintah Indonesia bersama-sama sejumlah LSM kemanusiaan nasional juga tengah merencanakan rehabilitasi rumah sakit di kawasan sekitar Gaza. Rencana pengiriman team di atas hingga saat ini masih menunggu kondusifnya situasi dan kondisi di lapangan sebagaimana secara rutin dilaporkan oleh Pemerintah Mesir. Dalam penyelesaian masalah Irak, Indonesia siap membantu dan memberikan kontribusi terhadap masalah Irak. Indonesia juga menegaskan kembali dukungan bagi kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan, dan keutuhan wilayah Irak serta prinsip non-interference terhadap masalah dalam negeri Irak. Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk membantu Irak memulihkan situasi dan kondisi menuju kemandirian dalam proses pembangunan kembali (*rebuilding*) antara lain melalui rencana upaya peningkatan hubungan kerjasama ekonomi perdagangan kedua negara.

1. Perkembangan situasi di Lebanon merupakan bagian yang tidak ternisahkan dalam kestabilan politik dan keamanan di wilayah Timur

Tengah secara keseluruhan. Atas permintaan PBB, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan pasukannya untuk bergabung di bawah UNIFIL, yakni Kontingen Garuda. Indonesia akan menambah pasukannya di Lebanon dalam pasukan perdamaian PBB UNIFIL sebagai bagian dari proyeksi partisipasi pasukan Indonesia yang menargetkan keterlibatan 2000 pasukan Indonesia dalam berbagai pasukan perdamaian PBB pada akhir tahun 2009. Indonesia mendukung pembukaan hubungan diplomatik antara Lebanon dan Suriah serta menyambut langkah bersejarah yang diharapkan mampu memperkuat kedaulatan dan stabilitas kedua negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa upaya pemerintah dalam mewujudkan peningkatan dan penguatan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional di berbagai bidang di kawasan Asia Pasifik dan Afrika telah berjalan cukup baik meskipun terdapat beberapa kekurangan, misalkan kurangnya kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan.

B. Efektifitas Dalam Meningkatkan Hubungan dan Kerja Sama Bilateral Dengan Negara-Negara Dan Organisasi Internasional Di Kawasan Amerika Dan Eropa.

Dalam upaya untuk mewujudkan meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara dan organisasi internasional di kawasan Amerika Dan Eropa dapat dikatakan mengalami peningkatan yang cukup

baik. Hal ini dapat dari makin membaiknya hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa semakin diperkokoh. Selain di bidang keamanan seperti upaya mengatasi ancaman terorisme, kerjasama juga menyangkut bidang ekonomi. Hubungan bilateral Indonesia – Amerika, selama tahun 2004 kawasan Amerika Utara merupakan mitra penting bagi Indonesia dari sudut politik, keamanan internasional dan ekonomi, mengingat negara-negara di kawasan tersebut, khususnya Amerika Serikat (AS) merupakan kekuatan utama dunia. Di bidang kerjasama keamanan, kedua negara memanfaatkan dua forum untuk membicarakan masalah keamanan, yaitu melalui Indonesia-US Security Dialog (IUSSD) dan Bilateral Defense Dialog (BDD). Forum IUSSD kedua telah dilaksanakan di Washington, D.C. tanggal 22-23 April 2004, sementara Forum BDD yang keempat telah dilaksanakan di Jakarta tanggal 3-4 Agustus 2004. Dengan terlaksananya pertemuan IUSSD kedua dan kesepakatan untuk melaksanakan pertemuan IUSSD ketiga di Indonesia tahun 2005, serta pertemuan interim Bilateral Defense Dialogue pada bulan Agustus tahun 2004, menunjukkan telah terlembaganya proses Security Dialogue sebagai salah satu komponen permanen dalam hubungan bilateral RI-AS. Kerjasama counter-teroris m RI-AS berjalan dengan baik. Pemerintah AS terus menaruh perhatian terhadap peran Indonesia di kawasan dalam memerangi terorisme, oleh karena itu AS meningkatkan bantuan, khususnya dalam capacity building Kepolisian RI sehingga unava membongkar jaringan

teroris di Indonesia, menghukum para pelaku, dan mencegah terjadinya aksi terorisme di kemudian hari terus menunjukkan hasil. Indonesia hingga kini masih terus berupaya mendapatkan akses langsung terhadap Hambali yang saat ini berada dalam tahanan AS.⁵⁰ Hubungan bilateral Indonesia - Inggris pada tahun 2004 ditandai dengan dimulainya kembali kerjasama militer Pemerintah Inggris dan Indonesia setelah adanya embargo suku cadang peralatan militer buatan Inggris dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu perkembangan positif kerjasama bilateral Indonesia dengan Uni Eropa (UE) pada tahun 2004, telah ditandatangani tiga *Financing Agreement (FA)*, yaitu untuk proyek *Good Governance in the Indonesian Judiciary*, dalam kerangka pelaksanaan *National Indicative Programme 2002 - 2004*. Pada tanggal 20 Juli 2004, Deplu RI dan Delegasi Komisi Eropa di Jakarta telah menandatangani *Memorandum of Understanding on National Indicative Program for Indonesia for 2005-2006* dengan jumlah hibah sebesar 72 juta Euro.

Dalam hal ini memang kepentingan Indonesia di kawasan Eropa dan Amerika telah terpenuhi namun masih terdapat beberapa kekurangan. Diantaranya adalah meningkatnya persaingan memasuki pasar Eropa Barat, terutama pasca perluasan keanggotaan UE dan semakin kompetitifnya produk-produk ekspor negara-negara pesaing Indonesia, seperti Cina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Lebih lanjut lagi, konsolidasi yang dilakukan oleh UE, telah membuat negara-negara anggotanya me-

review beberapa perjanjian bilateral yang sebelumnya telah ditandatangani dengan Indonesia. Hubungan bilateral juga ditengarai oleh beberapa isu khusus, antara lain, penyelesaian tuntutan hukum terhadap Hassan Tiro, penanganan kasus kematian Munir, serta penyelesaian kerja sama keuangan RI – Jerman, yang hingga kini masih diupayakan jalan keluarnya melalui jalur diplomasi secara intensif bersama-sama dengan instansi/departemen teknis terkait.

C. Pemenuhan dalam Upaya Mewujudkan Peran Dan Kepemimpinan Indonesia Dalam Kerja Sama ASEAN

ASEAN merupakan salah satu alat politik yang sangat diperhitungkan oleh Indonesia dalam mengembangkan kapabilitas kekuatan politik di luar negeri. Oleh karenanya Indonesia sangat memperhatikan pemenuhan dalam upaya mewujudkan peran dan kepemimpinan dalam kerjasama ASEAN. Dalam rangka meningkatkan ketahanan regional di kawasan Asia Tenggara, Indonesia akan tetap menjadikan ASEAN sebagai sokoguru pelaksanaan diplomasinya. Untuk memperkuat sokoguru diplomasi ini, Indonesia akan terus memperjuangkan terwujudnya Komunitas ASEAN (ASEAN Community) sebagaimana digariskan dalam *Bali Concord II*. Komunitas ASEAN ini merupakan andalan bagi terciptanya stabilitas politik dan kesejahteraan warga Asia Tenggara di masa mendatang, yang diharapkan akan berdampak positif pula bagi pembinaan stabilitas di kawasan yang berdekatan.

Pada tataran ASEAN Indonesia harus menyadari bahwa posisi Indonesia di ASEAN telah berubah dari negara dominan pada hampir semua aspek menjadi negara dominan karena faktor luas wilayah dan keamanan. Oleh karena itu, usulan Indonesia tentang *Asean Security Community* merupakan salah satu bukti keberhasilan diplomasi Indonesia. Namun disisi lain pemerintah Indonesia, yang baru perlu disadari bahwa pasca ditandatanganinya ASEAN charter, maka akan membawa banyak implikasi bagi hubungan Indonesia dengan kawasan Asia Tenggara. Indonesia harus bersiap-siap menghadapi terpaan hubungan yang lebih luas dengan negara-negara tetangga. Kebijakan luar negeri yang diambil kemudian harus benar-benar kuat dan mampu menopang penguatan didalam negeri untuk menghadapi terpaan ekonomi dan budaya yang akan semakin mudah masuk ke Indonesia. Disisi lain, permasalahan perbatasan dengan negara-negara dikawasan masih menjadi permasalahan. Permasalahan tapal batas darat dan laut Indonesia dengan Malaysia terutama di daerah Kalimantan Timur serta permasalahan perbatasan Indonesia dengan Singapura karena reklamasi pantai berpotensi mengganggu hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut. Agenda kebijakan luar negeri yang harus diambil dengan cepat adalah mengupayakan penyelesaian permasalahan tersebut dengan segera agar tidak lagi terjadi konflik-konflik perbatasan yang menimbulkan ketegangan. Permasalahan regional lainnya adalah masalah keamanan seperti perdagangan manusia, penyelundupan, pembajakan, narkoba, terorisme dan lain-lain. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintahan yang baru harus

berdasar pada kondisi ini dengan memantapkan kerjasama regional memerangi permasalahan diatas. Indonesia harus menggunakan kerjasama kawasan dalam ASEAN sebesar-besarnya untuk melakukan perlindungan kepentingan nasional.⁵¹

Dalam hal ini Indonesia telah berupaya meningkatkan melalui berbagai upaya diantaranya adalah: Dalam rangka meningkatkan ketahanan regional di kawasan Asia Tenggara, Indonesia akan tetap menjadikan ASEAN sebagai sokoguru pelaksanaan diplomasinya. Untuk memperkukuh sokoguru diplomasi ini, Indonesia akan terus memperjuangkan terwujudnya Komunitas ASEAN (ASEAN Community) sebagaimana digariskan dalam Bali Concord II. Komunitas ASEAN ini merupakan andalan bagi terciptanya stabilitas politik dan kesejahteraan warga Asia Tenggara di masa mendatang, yang diharapkan akan berdampak positif pula bagi pembinaan stabilitas di kawasan yang berdekatan.⁵²

D. Efektifitas Dalam Pemenuhan Upaya Memperkuat Citra Indonesia

Salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan SBY secara spesifik memang bertujuan untuk memenuhi efektifitas dalam pemenuhan upaya memperkuat citra Indonesia. Hal ini memang menjadi salah satu tujuan yang berbeda dibandingkan dengan masa

⁵¹ Agus Trihartono, "The Creation of the ASEAN Security Community (ASC) : The Indonesian Factor", Jurnal Sosial-Budaya dan Politik (JSBP) Volume VI, Nomor 2, November 2007, FISIP Universitas Jember, hal 723-736

⁵² Pemantapan Politik Luar Negeri Dan Peningkatan Kerja Sama Internasional, <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/3329/> diakses pada tanggal 4 Mei 2011

pemerintahan Indonesia sebelumnya. Oleh karenanya tujuan tersebut menjadi titik perhatian penuh oleh pemerintah Indonesia.

Indonesia terus berupaya meningkatkan dan memperkuat kerjasama di tingkat global di berbagai forum multilateral khususnya PBB. Saat ini muncul kecenderungan meningkatnya gejala unilateralisme dan menurunnya semangat multilateralisme dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia tetap mendukung penegakan multilateralisme terutama melalui kerangka PBB dalam menyikapi persoalan-persoalan dunia. Indonesia mendukung dan terlibat secara aktif dalam proses reformasi PBB, khususnya proses reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB dengan tujuan agar badan tersebut lebih merefleksikan situasi dunia pada saat ini. Dalam kerangka reformasi tersebut, Indonesia telah mengindikasikan pencalonannya sebagai anggota tetap DK PBB, disamping berupaya memperoleh kursi keanggotaan Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk periode 2007-2008 yang pembahasannya akan dilaksanakan pada tahun 2006. Terciptanya reformasi tentunya akan menjadikan PBB lebih responsif dalam menangani masalah-masalah global seperti penegakan HAM, pemberantasan terorisme internasional, perang terhadap kejahatan transnasional dan lain-lain.

Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan melalui kerangka kerjasama multilateral. Indonesia telah melakukan pertemuan dengan negara-negara donor CGI di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2004 yang

dihadiri oleh 30 wakil dari pihak donor. Dalam pertemuan tersebut pihak donor telah menegaskan kembali komitmen untuk menyediakan bantuan bagi Indonesia untuk Tahun Anggaran 2005 guna menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Pledge bantuan tersebut disampaikan secara formal pada Pertemuan CGI ke-14 pada bulan Januari 2005 di Jakarta.⁵³

Indonesia terus meningkatkan kerjasama melalui kerangka Gerakan Non Blok guna mengatasi kecenderungan kurangnya perhatian masyarakat internasional terhadap masalah-masalah seperti pembangunan, kemiskinan, dan penghapusan hutang, serta kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Indonesia dan negara-negara anggota GNB melalui KTM GNB di Durban pada bulan Agustus 2004 meminta agar dunia memperhatikan upaya multilateralisme di bidang ekonomi agar kondusif bagi terciptanya pemerataan kesempatan dan mengutamakan implementasi hasil konferensi utama PBB di bidang ekonomi dan sosial.

Indonesia juga menyambut baik disahkannya Program Kerja Doha, sebagai Keputusan Dewan Umum WTO bulan Juli 2004, yang menyepakati kerangka perundingan isu-isu utama yang telah menghidupkan kembali perundingan Putaran Doha. Keputusan Juli 2004 telah mendorong perhatian yang lebih besar dari negara-negara maju kepada isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam kerjasama multilateral lain, baik dalam kerangka PBB, seperti UNEP,

UN-ESCAP, UNCTAD, maupun non-PBB, seperti D-8 dan Kelompok G-15.⁵⁴

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: *Pertama*, program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik, dan persatuan nasional di samping memperkuat lagi kinerja diplomasi Indonesia. Dalam program ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan pokok antara lain adalah (1) merumuskan konsep pemberian respons yang lebih tegas, visioner, dan berkualitas yang berkaitan dengan isu-isu internasional yang strategis dalam setiap periode tertentu; (2) meratifikasi berbagai konvensi internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional dalam membangun demokrasi, keamanan, penerapan nilai-nilai HAM, perlindungan anak dan perempuan, pelestarian lingkungan hidup, serta kedaulatan NKRI; konsistensi dalam menjalankan proses demokratisasi dapat meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional; (3) mempersiapkan dan menyelenggarakan hubungan luar negeri serta memantapkan kebijakan luar negeri yang konsisten dan produktif bagi kinerja diplomasi Indonesia; (4) meningkatkan promosi dan citra Indonesia di luar negeri; (5) meningkatkan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri; merumuskan kebijakan diplomasi publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

⁵⁴ www.bappenas.go.id/-/get--file--server/-/node/-3329/, diakses pada tanggal 5 Mei 2011

E. Mengoptimalkan Diplomasi Melalui Pengelolaan Hukum Dan Perjanjian Internasional

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan diplomasi melalui pengelolaan hukum dan perjanjian internasional diantaranya karena kesadaran seiring dengan makin berkembangnya tuntutan dan suasana demokrasi di berbagai belahan dunia, suara masyarakat (atau entitas non pemerintah secara umum) telah makin mendapatkan tempat dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan dengan dukungan yang kuat dari masyarakatnya. Di sisi lain, dewasa ini aktor-aktor non negara makin mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar terhadap akses ekonomi dan politik sehingga mereka makin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu pemerintahan atau suatu negara. Peranan diplomasi tradisional (yaitu diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah) tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya instrumen utama untuk membentuk citra positif suatu negara di dunia internasional. Aktivitas diplomasi tradisional perlu dilengkapi dengan intensifikasi diplomasi publik. Pendekatan diplomasi publik juga mengalami redefinisi dan ekstensifikasi, untuk memenuhi berbagai tuntutan global yang makin kompleks.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan bantuan hukum bagi WNI, khususnya Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, pemerintah menerapkan kebijakan *multi-pronged approach*, yaitu internal, bilateral dan regional serta multilateral. Dalam rangka pendekatan internal, Deplu bekerjasama dengan instansi terkait melakukan langkah-langkah upaya

perbaikan sistem rekrutmen, pengiriman dan penempatan TKI di luar negeri. Deplu memberikan masukan-masukan berdasarkan kenyataan kasus-kasus yang menimpa TKI di luar negeri yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan pada sistem tersebut, dan memberi penerangan mengenai perlunya WNI/TKI melaporkan kedatangan dan keberadaannya ke Perwakilan RI setempat.

Deplu juga berperan aktif dalam penyusunan UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan produk-produk hukum lainnya. Masukan-masukan Deplu termasuk berdasarkan kajian terhadap konvensi-konvensi utama ILO dan lainnya. Di tingkat bilateral, Pemerintah Indonesia telah mengadakan perjanjian bilateral/MOU mengenai tenaga kerja dengan Malaysia, Kuwait, Yordania dan Korea Selatan. Pada tingkat multilateral, bulan September 2004 pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Protection of Migrant Workers and their Families* yang diharapkan diratifikasi pada tahun

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa temuan mengenai langkah atau peran Indonesia dalam meningkatkan pertahanan keamanan yaitu memberikan dukungan dalam peningkatan citra politik Indonesia di mata internasional semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu langkah pemerintah Indonesia dalam reformasi pertahanan keamanan yaitu berupa (a) pembentukan Rangkaian Kebijakan Pertahanan Negara Sesuai Dengan Mandate Pasal 16 UU 3/2002, (b) penegakan kontrol sipil obyektif dan menyusun ulang anggaran pertahanan Indonesia. (c) Menyusun ulang anggaran pertahanan Indonesia. Hal ini dikarenakan munculnya pertimbangan bahwa adanya prinsip utama yang harus ditegakkan disini adalah pemerintah harus menyediakan seluruh kebutuhan pertahanan negara untuk membentuk TNI yang tangguh dan professional.

Kondisi Pertahanan Kemanan Nasional demikian mendukung langkah diplomasi Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Langkah-langkah yang paling menonjol dilakukan oleh Indonesia, yaitu: (1), efektifitas dalam meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara dan organisasi internasional di kawasan Amerika dan Eropa; Dalam meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara dan organisasi internasional di kawasan Amerika dan Eropa telah berjalan cukup baik meskipun terdapat beberapa kekurangan, misalkan kurangnya kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan

(2) Pertahanan Keamanan Nasional yang kuat mendukung pemenuhan dalam upaya mewujudkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN; Dalam hal ini telah berjalan dengan baik meskipun target Indonesia untuk mendirikan komunitas ASEAN seperti halnya Uni Eropa merupakan langkah yang masih jauh. Dalam rangka meningkatkan ketahanan regional di kawasan Asia Tenggara, Indonesia akan tetap menjadikan ASEAN sebagai sokoguru pelaksanaan diplomasinya. Untuk memperkukuh sokoguru diplomasi ini, Indonesia akan terus memperjuangkan terwujudnya Komunitas ASEAN.

(3) Pertahanan Keamanan Nasional yang kuat mendukung efektifitas dalam pemenuhan upaya memperkuat citra Indonesia. Salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono secara spesifik memperkuat citra Indonesia. Hal ini salah satu tujuan yang berbeda dibandingkan dengan masa pemerintahan Indonesia sebelumnya. Oleh karenanya tujuan tersebut menjadi titik perhatian penuh oleh pemerintah Indonesia.

(4) Pertahanan Keamanan Nasional yang kuat mengoptimalkan diplomasi melalui pengelolaan hukum dan perjanjian internasional. Upaya pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan diplomasi melalui pengelolaan hukum dan perjanjian internasional diantaranya (a) tuntutan dan suasana demokrasi di berbagai belahan dunia, suara masyarakat (b) pemberantasan kejahatan transnasional (c) toleransi kehidupan dalam multikultural bangsa

DAFTAR PUSTAKA

Ade Priangani, "Tantangan Politik Luar Negeri Masa Pemerintahan SBY-Jusuf Kalla", *Jurnal Paradigma Polistaat*, Vol. 5 No. 3, Desember 2004-Februari 2005

Al Araf, *Peran Parlemen dalam Reformasi Sektor Keamanan, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit*, Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) 2006

Anak Agung Banyu Perwita (eds), *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, 2006, Propatria

Andre H. Pareira, "Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 1 No. 2, Jakarta, Mei 2005, hal. 149-159

Anonymous. 2009. *Diplomasi Soekarno Hingga SBY Prinsip Politik Luar Negeri melalui <http://masniam.wordpress.com/2009/04/02/landasan-politik-luar-negeriindonesia>*

Bandoro, Bantarto (ed), *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*. Jakarta:CSIS, 1994.

Djalal, Dr Hasjim, *Respon dan Kebijakan RI Terhadap Dinamika Politik dan Keamanan Internasional*, makalah dalam Seminar Indonesia dan Dinamika Internasional, Jakarta, 5 November 1996.

Djumadi M. Anwar, *Spektrum Diplomasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif*, Fisipol-UMY, Yogyakarta

Djumadi M. Anwar, *Politik Luar Negeri Indonesia Menggalang Kerjasama Selatan dan Selatan*, Aditya Media, Yogyakarta, 1994,

Dermawan, P Yulius. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi*. Bandung: Graha Ilmu Bandung. 2007.

Hadi, Umar dan Wardana. *Mewujudkan Kepedulian dan Keberpihakan: Potret Satu Tahun Pelaksanaan "Citizen Service" di Singapura*. Jakarta: KBRI Singapura dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2008

- Jack C Plano and Roy Olton, *Internasional Relation Dictionary*, Holt and Winston, New York, 1969
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Graha Ilmu. 2008.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980
Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jilid I Gerakan XXII, Yasbit PSY-UGM, Yogyakarta, 1971
- Michael Smith et, al. *Perspective On World Politics*, Routledge, London
- M. Riza Sihbudi, *Indonesia-Timur Tengah, Masalah dan Prospek*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997
- Mufti Makaarim, *Critical Review Peraturan Presiden Nomor 7/2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara*. Makalah Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) Jakarta. September 2008
- Metodologi Penelitian Praktek*, Balai Penelitian dan Peninjauan Sosial, Departemen Sosial RI, Yogyakarta
- Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989
- Mohtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hal. 4
- Rabasa, Angel & Peter Chalk. 2001. *Indonesia' SBY Transformation and The Stability of Southeast Asia*. Arlington: RAND
- Rudy, T May. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama. 2003
- Samuel P Huntington, *Arms Races : Prerequisites and Results In Public Policy*, Harvard, Harvard University, 1958
- Shambazy, Budiarto, *Politik Luar Negeri Indonesia: Dominasi Sosok Presiden Indonesia*, Kompas, 16 Agustus 1998
- Tri Nuke Pudjiastuti (2007). *Mencermati Kembali Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian

William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992, ed.2

Winarno, Budi. Globalisasi : Peluang atau Ancaman bagi Indonesia. Jakarta: Erlangga. 2008.

Wuryandari, Ganewati (ed). Politik Luar Negeri Indonesia Ditengah Pusaran Politik Domestik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

JURNAL

Arah Kebijakan Pertahanan Negara 2004-2009 Working Group on Security Sector Reform, Monograph No-5, 31 Januari 2005 31

Redefinisi, reposisi dan reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa”, Pokok-pokok Kebijakan Menhankam/Pangab, Edisi 2 Jakarta: Markas Besar ABRI, Cilangkap, Jakarta 1999

Ulang Strategi Pertahanan Nasional Working Group on Security Sector Reform, Monograph No-3, 26 Maret 2004

INTERNET

(<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=54>, diakses 1 Mei 2011

“Natuna Resmi Tolak Daerahnya Arena Perang” <http://news.melayuonline.com> diakses 1 Mei 2011

Budiono Kartohadiprojo, ”Dilema Cinta pada Negeri Tetangga” http://www.gatra.com/2007-08-21/versi_cetak.php?id=107040 diakses pada tanggal 1 Mei 2011

http://fikiranbertindak.multiply.com/journal/item/3/POLITIK_LUAR_NEGERI_INDONESIA_BEBAS_AKTIF

http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/articles_index/idx.asp? diakses pada tanggal 1 Mei 2011

<http://www.tokohindonesia.com/ensiklonedi> diakses pada tanggal 1 Mei 2011

Rapor Merah Pemerintahan SBY-JK , Dalam Agenda Perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia, di Luar,
<http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=678>, diakses pada tanggal 1 Juli 2010

Riza Noer Arfani, Diplomasi Paras Tinggi Untuk Indonesia,
http://www.ireyogya.org/ire.php?about=f22_gagas.htm diakses pada tanggal 1 Juli 2011

Tonny Dian Effendi, Agenda Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Pemilihan Presiden 2009,
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/138/164> diakses tanggal 8 Februari 2011

<http://www.dephan.go.id/poahan/pengertian.htm> diakses pada tanggal 1 Juli 2010

www.Scribd.Com Shoof work Essav & Theses- Tembolok 19 Anril 2010